

**ANALISIS KONTRIBUSI RETRIBUSI PASAR TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MAKASSAR TAHUN 2010-
2014**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Jurusan Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis islam
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Oleh

ROHANDI. S

10700111067

**ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2017**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rohandi. S
NIM : 10700111067
Tempat/Tanggal Lahir : Uloe 22-01-1993
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Uloe Kec. Dua Boccoe Kab. Bone
Judul : Analisis Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar Tahun 2010-2014.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Skripsi ini adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Makassar, November 2017
Penyusun,

ROHANDI. S
NIM: 10700111067

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “**Analisis Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Tahun 2010-2014**” yang disusun oleh **Rohandi.S**, NIM : 10700111067, Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 29 November 2017, bertepatan dengan 10 Rabi’ul-Awwal 1439 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ilmu Ekonomi.

Makassar, 13 Februari 2018
27 Jumadil-Awwal 1439 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.	(.....)
Penguji I	: Dr. Mudassir, SE., MM., Ak.	(.....)
Penguji II	: Ismawati, SE., M.Si	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Amiruddin K., M.El	(.....)
Pembimbing II	: Bahrul Ulum Rusydi., SE., M.Sc.	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
(NIP. 19580221 198703 1 002)

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan Taslim semoga senantiasa tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita dari alam kejahiliyaan menuju alam kedamaian.

Dalam penulisan skripsi yang sederhana ini, penulis menyadari bahwa literatur dan data yang disajikan masih minim jumlahnya, karena keterbatasan dana dan waktu. Oleh karena itu, demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan koreksi, saran, dan kritik yang sifatnya membangun dari para pembaca.

Penyusunan skripsi ini terselesaikan berkat adanya kerjasama, bantuan, arahan, bimbingan dan petunjuk-petunjuk dari berbagai pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, sehingga patut kiranya penyusun menghaturkan banyak terima kasih kepada:

- 1) Orang tua tercinta, Bapakku Suardi, dan ibuku St.Rohani yang selama ini menjadi motivator pribadiku. Dan juga adik-adikku Nurhalizah, Muhammad Asraf, Nur Hikmah, dan Nur Hidayah, terima kasih atas kasih sayang dan untaian do'a yang selalu dicurahkan demi kelancaran dan kesuksesan ananda sehingga dapat menyelesaikan proses perkuliahan.

- 2) Bapak Dr. Amiruddin K.,S.Ag.,M.EI dan Bapak Bahrul Ulum Rusydi.,SE.,M.Sc selaku Dosen Pembimbing yang telah memberi pengarahan dan bimbingan kepada penulis hingga selesainya Skripsi ini.
- 3) Prof. Dr. Musafir Pababbari, M. Si. Selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
- 4) Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam..
- 5) Bapak Dr. Siradjuddin, SE., M.Si dan Hasbiullah, SE, M. Si selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan motivasi.
- 6) Para Bapak/Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan yang berguna dalam penyelesaian studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
- 7) Para sahabat dan teman-teman seperjuanganku angkatan 2011, Nurlina SE, Zakiya Tauri, Sariani, Nurlaila SE, Nur Qadri Sidratullah SE, Nurdianto SE, Risma Damayanti SE, Nurhidayanti SE, Nur Siba SE, Siti Nurnia SE, Nuraeni SE, Mursida SE, Musdalifa SE, Nuratmi Eka Septianti SE, Sahri Bulandari SE, Ria, Nini Ahrianti, Zulkifli SE, Sapriadi SE, Supriadi SE, Riswan SE, Wahyu SE, Wachid Ginanjar, Mulyadi, Sulferi SE, Risno Mulyadi, dan yang terkhusus buat Bondengku Risnawati SE, yang selalu membantu dan memberi dorongan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 8) Terima kasih kepada keluarga kecil saya, selaku teman-teman KKN Reguler Angkatan 50 Desa Belapunranga, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa. Ahmad Sudirman, Rifki, Fahri, St. Subuh, Fira, Fitri dan terima kasih juga kepada Kepala Dusun Pappareang Bahtiar Dg Lewa, dan Ibu Dg Kebo, serta

masyarakat Dusun Pappareang, Desa Belapunranga yang memberikan pengalaman yang paling berharga selama 2 bulan berKKN.

- 9) Teman-teman dan semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan namanya secara satu persatu.

Akhirnya kepada Allah jugalah, penulis memohon doa dan Rahmat-Nya Semoga senantiasa dalam penulisan skripsi ini mendapat pahala dan berkah disisi-Nya dan bermanfaat bagi orang banyak.

Tak lupa penulis mengucapkan kata maaf yang sebesar-besarnya. Karena menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tak luput dari kesalahan, baik dari redaksi kata-kata maupun yang lainnya yang tidak berkenan dihati. Sesungguhnya kebenaran mutlak hanyalah milik Allah SWT dan manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Semoga kita selalu dalam lindungan lillahi Rabbi.

Amin Yaa Rabbal Alamin.



Makassar, November 2017
Penyusun

ROHANDIS
NIM. 10700111067

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Penelitian Terdahulu.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN TEORITIS	12
A. Gambaran Umum Pendapatan Asli Daerah (PAD) ..	12
1. Definisi Pendapatan	12
2. Definisi Pendapatan Asli Daerah	12
B. Gambaran Umum Retribusi Daerah	18
1. Definisi Retribusi Daerah	18
2. Ciri-ciri Retribusi Daerah	20
3. Objek dan Golongan Jasa Retribusi Daerah	21
4. Retribusi Dalam Perspektif Islam.....	24
C. Gambaran Umum Pasar dan Retribusi Pasar.....	25
1. Definisi Pasar.....	25
2. Bentuk Pasar	27
3. Definisi Retribusi Pasar	29
4. Klasifikasi Retribusi Pasar.....	30
5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Retribusi Pasar.....	30
 D. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli	

Daerah.....	32
E. Kerangka Fikir.....	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian	34
C. Jenis dan Sumber Data	34
D. Metode Pengumpulan Data	35
E. Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37
A. Gambaran Umum	37
1. Letak Geografis dan Wilayah.....	37
2. Iklim.....	38
3. Penduduk	38
4. Pasar	38
B. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	39
C. Analisis Kontribusi	40
1. Hasil Analisis Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar tahun 2010-2014.....	41
2. Pembahasan Analisis Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar tahun 2010-2014.....	43
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kerangka Pikir	33
Gambar 2	Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap PAD	42
Gambar 3	Kontribusi Pasar Makkassar Mall di Kota Makassar	44
Gambar 4	Kontribusi Pasar Terong di Kota Makassar	45
Gambar 5	Kontribusi Pasar Butung di Kota Makassar	46
Gambar 6	Kontribusi Pasar Kampong Beru di Kota Makassar	48
Gambar 7	Kontribusi Pasar Pannampu di Kota Makassar	49
Gambar 8	Kontribusi Pasar Kalimbu di Kota Makassar	50
Gambar 9	Kontribusi Pasar Sambung Jawa di Kota Makassar	52
Gambar 10	Kontribusi Pasar Maricayya di Kota Makassar	53
Gambar 11	Kontribusi Pasar Sawah di Kota Makassar	54
Gambar 12	Kontribusi Pasar Pa'baeng-baeng di Kota Makassar	56
Gambar 13	Kontribusi Pasar Parang Tambung di Kota Makassar	57
Gambar 14	Kontribusi Pasar Panakkukang di Kota Makassar	58
Gambar 15	Kontribusi Pasar Niaga Daya di Kota Makassar	60
Gambar 16	Kontribusi Pasar Mandai di Kota Makassar	61
Gambar 17	Kontribusi Pasar Darurat Utara di Kota Makassar	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Target dan Realisasi PAD Kota Makassar 2010-2014.....	5
Tabel 2	Data Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kota Makassar 2010-2014.....	7
Tabel 3	Data Target dan Realisasi Retribusi Pasar Kota Makassar 2010-2014.....	8
Tabel 4	Luas Wilayah Kota Makassar Menurut Kecamatan.....	37
Tabel 5	Jumlah Penduduk Kota Makassar Menurut Kecamatan Tahun 2013	38
Tabel 6	Pasar di Kota Makassar	39
Tabel 7	Data Target dan Realisasi PAD Kota Makassar 2010-2014	40
Tabel 8	Kontribusi Pasar Makassar Mall terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Makassar 2010-2014	43
Tabel 9	Kontribusi Pasar Terong terhadap Penerimaan Retribusi Pasar Di Kota Makassar Tahun 2010-2014	45
Tabel 10	Kontribusi Pasar Butung terhadap Penerimaan Retribusi Pasar Di Kota Makassar Tahun 2010-2014	46
Tabel 11	Kontribusi Pasar Kampung Beru terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Makassar Tahun 2010-2014	47
Tabel 12	Kontribusi Pasar Panampu terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Makassar tahun 2010-2014	49
Tabel 13	Kontribusi Pasar Kalimbu terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Makassar Tahun 2010-2014	50
Tabel 14	Kontribusi Pasar Sambung Jawa terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Makassar Tahun 2010-2014	51
Tabel 15	Kontribusi Pasar Maricayya terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Makassar Tahun 2010-2014	53
Tabel 16	Kontribusi Pasar Sawah terhadap terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Makassar Tahun 2010-2014.....	54
Tabel 17	Kontribusi Pasar Pa'baeng-baeng terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Makassar tahun 2010-2014	55
Tabel 18	Kontribusi Pasar Parang Tambung terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Makassar Tahun 2010-2014.....	57
Tabel 19	Kontribusi Pasar Panakkukang terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Makassar Tahun 2010-2014	58

Tabel 20	Kontribusi Pasar Niaga Daya terhadap Penerimaan Rteribusi Pasar di kota Makassar Tahun 2010-2014	59
Tabel 21	Kontribusi Pasar Mandai terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Makassar tahun 2010-2014	61
Tabel 22	Kontribusi Pasar Darurat Utara terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Makassar tahun 2010-2014	62



ABSTRAK

NAMA : Rohandi. S
NM : 10700111067
JUDUL SKKIPSI : Analisis Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar Tahun 2010-2014

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar. Data yang digunakan adalah Data sekunder yang bersumber dari DISPENDA Kota Makassar dan PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar. Metode Analisis yang di gunakan yaitu analisis kontribusi, yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar relatif kecil selama tahun 2010-2014. Pada tahun 2010 kontribusi retribusi pasar terhadap PAD Kota Makassar 2,5 persen menurun menjadi 1,34 persen pada tahun 2011, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2012 menjadi 1,15 persen,. Pada tahun 2013 dan 2014 retribusi pasar terhadap PAD mengalami peningkatan masing-masing 1,19 persen dan 1,34 persen.

Rendahnya kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar, disebabkan karena program intensifikasi pemerintah dalam hal ini penarikan retribusi secara intensif oleh petugas retribusi daerah belum optimal serta kesadaran masyarakat wajib retribusi masih rendah. Selain dua hal tersebut, rendahnya kontribusi retribusi pasar terhadap PAD juga disebabkan karena kontribusi objek pasar terhadap retribusi pasar dinilai masih rendah.

Kata Kunci: *Retribusi Pasar, PAD (Pendapatan Asli Daerah).*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi bangsa tapi juga berdampak signifikan dan menyeluruh terhadap sistem politik dan keadaan sosial masyarakat. Sistem ekonomi di Indonesia menjadi sangat terpuruk sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan memberlakukan ekonomi daerah pada tahun 2001. Otonomi daerah yang dilaksanakan per 1 Januari 2001 telah memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dan para pelaku ekonomi daerah dalam mengelola pembangunan di daerah.

Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah merupakan suatu landasan bagi pengembangan ekonomi daerah. Pengembangan ekonomi daerah diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peranserta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Undang-undang No. 32 tahun 2004 merupakan bentuk penyalarsan dari undang-undang No. 22 tahun 1999 sebagai akibat adanya perkembangan keadaan, ketatanegaraan serta tuntutan pada masa sekarang.

Proses desentralisasi pemerintahan yang dilakukan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah sebagai wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah memberikan konsekuensi terhadap pemerintah daerah untuk dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Otonomi daerah adalah proses

devolusi dalam sektor publik dimana terjadi pengalihan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota atau proses pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dan kabupaten dan kota sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang.¹

Proses desentralisasi tersebut didukung dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan keleluasaan bagi masing-masing daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, juga memberikan ruang bagi daerah untuk menggali dan mendayagunakan potensi yang dimiliki secara optimal.

Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, membawa implikasi yang mendasar terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada dasarnya pemberian otonomi daerah adalah dalam rangka membantu penyelenggaraan pemerintah pusat terutama dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan program-program pembangunan, sehubungan dengan hal tersebut, daerah dituntut untuk lebih aktif dalam upaya meningkatkan kemampuan dan kemandiriannya, menggali serta mengembangkan potensi sumber-sumber ekonomi dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Pada saat ini titik berat pemberian otonomi daerah diberikan kepada pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota. Hal ini erat kaitanya dengan fungsi utama pemerintah daerah sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan di samping sebagai pemerintah yang

¹ Mas'ud Said, *Arah Baru Otoni Daerah di Indonesia* (Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2008) h. 5

paling dekat dengan masyarakat, sehingga mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya dari masyarakat di daerahnya.

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal1 ayat 5 menyatakan bahwa hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini diharapkan menjadi solusi agar daerah menjadi mandiri dalam membiayai rumah tangganya sendiri. Kemandirian suatu pemerintah daerah diukur melalui pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lainnya yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang bersangkutan, dan merupakan pendapatan daerah yang sah. Semakin tinggi tingkat pendapatan asli daerah dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Kaitannya dalam pemberian otonomi kepada daerah dalam merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan keuangan daerah sesuai dengan kondisi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengurangi ketergantungan suatu daerah kepada pusat.² Pada prinsipnya semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat.

² Insukindro, dkk, *Peranan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Usaha Peningkatan Pendapatan Asli Daerah* (Yogyakarta: KKD, FE UGM 1994), h. 1

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan harus ditingkatkan seoptimal mungkin dalam rangka mewujudkan semangat kemandirian lokal. Mandiri diartikan sebagai semangat dan tekad yang kuat untuk membangun daerahnya sendiri dengan tidak semata-mata menggantungkan pada fasilitas atau faktor dari luar. Meskipun dimaklumi bahwa sebagian besar daerah otonom (kabupaten/kota), kemampuan PAD-nya kecil, sehingga masih diperlukan bantuan keuangan dari pemerintah pusat. Meskipun tingkat ketergantungan keuangan daerah otonom terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi (kuat), namun diharapkan kepada setiap daerah otonom untuk mengidentifikasi seluruh potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki untuk ditingkatkan secara intensif dan ekstensif di samping peningkatan pengelolaan sumber daya alam di daerah sebagai hasil pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004.

Pemerintah Kota Makassar dalam usahanya untuk mengembangkan dan membangun daerahnya telah berupaya untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerahnya sesuai potensi yang dimiliki. Upaya tersebut dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD, agar peningkatan target setiap tahunnya dapat diikuti dengan pencapaian realisasi secara konsisten. Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah Kota Makassar dalam mengelola sumber-sumber pendapatan asli daerah tersebut, dan perkembangan di dalam menunjang pelaksanaan pembangunan serta jalannya roda pemerintahan di Kota Makassar, berikut ini penulis menyajikan data tentang perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2010 sampai 2014.

Berdasarkan Tabel 1 di bawah dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar berfluktuasi namun cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini terlihat dari tabel realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2010 sebesar Rp. 210.136.331.008, pada tahun 2011 naik sebesar Rp. 351.692.552.588, di tahun 2012 sebesar Rp. 484.972.799.508, di tahun 2013 sebesar Rp. 627.241.924.947, pada tahun 2014 terjadi penurunan sebesar Rp. 608.956.221.212 meski terjadi penurunan tetapi masih memenuhi target yang ada, sebagaimana yang terlihat dari data realisasi tersebut, data tahun 2010 samapai 2014 realisasi PAD Kota Makassar cenderung meningkat, terlihat dari 4 tahun terakhir (2011-2014) selalu memenuhi target yang artinya pendapatan dari Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar terus mengalami peningkatan.

**Tabel 1 Data Target dan Realisasi PAD
Kota Makassar 2010-2014 (Rupiah)**

Tahun	Target	Realisasi
2010	216.928.890.000	210.136.331.088
2011	345.335.311.000	351.692.552.588
2012	441.234.952.000	484.972.799.508
2013	569.727.462.000	627.241.924.947
2014	608.955.576.000	608.956.221.212

Sumber : DISPENDA Kota Makassar (diolah)

Menurut UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, peningkatan pendapatan daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan (i) pajak daerah, (ii) retribusi daerah, (iii) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (iv) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sebagian besar pendapatan asli daerah ini digolongkan dalam pungutan

(retribusi), bahkan untuk kabupaten dan kota, pungutan hampir mencapai setengah dari seluruh pendapatan daerah, dimana sumber penerimaan retribusi daerah terbesar adalah retribusi pasar, rumah sakit dan klinik, izin bangunan, dan terminal bus atau taksi.

Berdasarkan sumber pendapatan asli daerah tersebut diatas yang memberi masukan pada kas daerah Kota Makassar adalah retribusi daerah. Retribusi daerah pada dasarnya dikelola sendiri oleh setiap daerah, maksudnya untuk pengelolaan retribusi daerah ini antara daerah yang satu dan daerah yang lain berbeda-beda sesuai dengan keadaan daerah masing-masing. Berikut data realisasi retribusi daerah Kota Makassar dari tahun 2010 sampai 2014.

Berdasarkan dari tabel 2 di bawah di jelaskan bahwa realisasi retribusi daerah dari tahun 2010-2014 kurang produktif terlihat dari tahun 2010 sebesar Rp. 59.729.103.725, di tahun 2011 sebesar Rp. 62.043.147.863, di tahun 2012 sebesar Rp. 69.257.410.559, di tahun 2013 sebesar Rp. 79.650.936.626 dan pada tahun 2014 sebesar Rp. 60.145.121.112. Dari data realisasi retribusi daerah yang ada selama lima terakhir, tak satu pun yang memenuhi target yang di tetapkan, yang menjelaskan bahwa dalam pos-pos atau sumber-sumber pemasukan retribusi daerah Kota Makassar masih perlu untuk di kelola atau di kembangkan lagi guna untuk mendorong penambahan pemasukan bagi retribusi daerah Kota Makassar.

**Tabel 2 Data Target dan Realisasi Retribusi Daerah
Kota Makassar 2010-2014 (Rupiah)**

Tahun	Target	Realisasi
2010	62.971.506.000	59.729.103.725

2011	66.549.806.000	62.043.147.863
2012	84.141.194.000	69.257.410.559
2013	86.772.319.000	79.650.936.626
2014	84.844.404.000	60.145.121.112

Sumber : DISPENDA Kota Makassar (diolah)

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Salah satu pungutan retribusi daerah adalah retribusi pasar. Retribusi pasar ini termasuk dalam retribusi jasa umum yang memberikan kontribusi yang cukup potensial terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah harus benar-benar menggunakan hasil retribusi pasar ini dengan sebaik-baiknya. Sebagai tindak lanjut yang di ambil oleh pemerintah daerah dalam mengatasi segala permasalahan yang ada di daerahnya adalah melakukan program dengan meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah utamanya dari sektor pajak dan retribusi daerah sebagai sumber yang potensial dalam rangka mencapai dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Oleh karna itu, pendapatan daerah sektor retribusi dikatakan cukup potensial dan mempunyai peran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah karna retribusi merupakan pembayaran langsung dari rakyat kepada pemerintah yang tercermin dari adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut.

Seperti yang kita ketahui bahwa Kota Makassar merupakan salah satu kota yang mampu menggali potensi daerahnya sendiri. Salah satu potensi yang dimiliki adalah pendapatan retribusi pasar. Berikut data target dan realisasi retribusi pasar Kota Makassar dari tahun 2010 sampai 2014.

Berdasarkan tabel 3 dijelaskan bahwa realisasi retribusi pasar pada tahun 2010 sampai 2014 berfluktuatif cenderung meningkat, dilihat pada tahun 2010 sebesar Rp. 5.294.025.400, tetapi di tahun 2011 menurun sebesar Rp. 4.690.429.675, kemudian pada tahun 2012 kembali meningkat sebesar Rp. 5.569.987.300, di tahun 2013 sebesar Rp. 7.436.110.500 dan pada tahun 2014 sebesar Rp. 8.091.032.500.

Tabel 3 Data Target dan Realisasi Retribusi Pasar Kota Makassar 2010-2014 (Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi
2010	5.336.198.850	5.294.025.400
2011	5.929.784.700	4.690.429.675
2012	5.435.136.000	5.569.987.300
2013	7.279.437.211	7.436.110.500
2014	8.243.137.440	8.091.032.500

Sumber: PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar. (diolah)

Pasar merupakan suatu unit usaha yang memiliki peran strategis atas jalannya distribusi produsen ke konsumen yang membutuhkan suatu produk. Dengan demikian pasar dapat dikatakan penyedia langsung kebutuhan masyarakat. Kondisi ini menegaskan bahwa pasar merupakan salah satu kontributor bagi pelaksanaan pembangunan daerah karena melalui retribusi yang dihasilkan akan dapat menambah pendapatan asli daerah. Keberadaan pasar yang didalamnya tertampung dinamika ekonomi masyarakat yang membutuhkan penanganan yang bijak dalam pengelolaannya, untuk itu pasar yang disatu pihak merupakan sumber penerimaan pendapatan daerah perlu perlu diintensifkan pungutan retribusinya dengan potensi yang ada.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis terdorong untuk meneliti dan menganalisis dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul ***“Analisis Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar Tahun 2010-2014”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah berapa kontribusi retribusi pasar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar?

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Haryadi (2003) Kontribusi retribusi pasar terhadap peningkatan PAD dalam melaksanakan otonomi daerah di Kota Bengkulu tahun anggaran 1998/1999-2001, menyimpulkan bahwa kontribusi retribusi pasar terhadap peningkatan PAD bersifat fluktuatif.

Pada tahun anggaran 1998-1999 presentase retribusi pasar terhadap PAD sebesar 51,90%, dan pada tahun anggaran 1999-2000 mengalami kenaikan sebesar 28,42 %. Kontribusi retribusi pasar terhadap PAD terus mengalami penurunan, pada tahun anggaran 1998/1999 presentasenya sebesar 20,60 %, tahun anggaran 2000 sebesar 13,88%, dan tahun anggaran 2001 sebesar 12,23 %.³

Bagus Santoso (1995), telah menganalisis Retribusi Pasar sebagai Pendapatan Asli Daerah, studi kasus pasar Kabupaten Sleman periode tahun anggaran 1988/1989 sampai dengan tahun 1991/1992. Sebagian penerimaan

³Dedy, Haryadi, *Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan PAD Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah Kota Bengkulu* (Yogyakarta: Skripsi Fisip UMY 2003).

Retribusi Daerah berasal dari rumah sakit dan pasar. Di DIY maupun di Kabupaten Sleman menunjukkan transformasi struktural yang seragam yaitu peran yang semakin meningkat, penerimaan retribusi daerah sebesar 9,4% pada tahun anggaran 1988/1989 dan turun menjadi 7,4% (1991/1992) dari seluruh penerimaan Pemda Kabupaten Sleman .

Persentase pengeluaran penerimaan retribusi rumah sakit menurun dari 28,92% (1988/1989) menjadi 26,21% (1991/1992). Sedangkan persentase penerimaan retribusi pasar dari 26,21% (1988/1989) menjadi 36,02% (meningkat). Pemungutan retribusi pasar dilakukan berdasarkan Perda No. 10/1993.⁴

Penelitian yang dilakukan oleh R. Agoes Kamaroellah (2007) Analisis kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan tahun anggaran 2002-2006, dimana dari hasil penelitian ini, kontribusi retribusi pasar terhadap PAD dari tahun 2002 sampai 2006 selalu menurun dilihat dari tahun (2002) 11,81% turun di tahun (2003) menjadi 9,84% dan terus menurun di tahun (2004) 9,78% dan (2005) 6,67% sampai tahun (2006) menembus angka 3,63%. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak sebanding dengan peningkatan pemungutan retribusi pasar.⁵

D. Tujuan Penelitian

⁴Bagus, Santoso, *Retribusi Pasar Sebagai Pendapatan Asli Daerah, Studi Kasus: Pasar Kabupaten Sleman* (Prisma No 4 1995).

⁵R. Agoes Kamaroellah. *Analisis kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan tahun anggaran 2002-2006* (Pamekasan: Skripsi Universitas Islam Madura UIM 2007).

Berdasarkan uraian diatas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah “untuk mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar”.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini di harapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Makassar

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kota Makassar, khususnya kepada PD. Pasar Makassar Raya selaku pengelola retribusi pasar dalam merumuskan kebijakan strategis untuk meningkatkan Kontribusi penerimaan retribusi pasar dalam mendorong peningkatan pendapatan asli daerah Kota Makassar.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik pada penelitian yang sama dapat dijadikan sumber referensi dan data tambahan mengenai analisis kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah di Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Gambaran Umum Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Definisi Pendapatan

Pendapatan merupakan pos yang penting dari laporan keuangan dan mempunyai penggunaan yang bermacam-macam untuk berbagai tujuan. Penggunaan informasi pendapatan yang paling utama adalah untuk tujuan pengambilan keputusan, dan biasanya sebagai tolak ukur berhasilnya suatu organisasi atau instansi dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya.

Pendapatan daerah yang berasal dari semua penerimaan kas daerah dalam periode anggaran menjadi hak daerah. Dalam hal ini kita dapat melihat bahwa pendapatan daerah diakui dan dicatat berdasarkan asas kas yaitu diakui dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima dan merupakan hak daerah. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada di daerah.

2. Definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber penerimaan yang harus selalu terus menerus dipacu pertumbuhannya. Dalam otonomi daerah ini kemandirian pemerintah daerah sangat dituntut dalam pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Pendapatan asli daerah Merupakan

pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah ,hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otoda sebagai perwujudan asas desentralisasi.⁶

Menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004, pasal 1, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber didalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa :

1. PAD bersumber dari :

a. Pajak daerah

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya dapat membiayai pengeluaran-pengeluaran umum untuk menyelenggarakan pemerintahan⁷. Pajak daerah dapat didefinisikan sebagai pajak Negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah dengan undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 pajak daerah didefinisikan sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi

⁷ Herlina Rahman, *Pengertian PAD* (Jakarta : 2015) h. 43

⁸Andriani, *Buku dasar-dasar perpajakan* (Jakarta : 2000) h. 21

atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

b. Retribusi daerah

Retribusi daerah dapat didefinisikan sebagai pungutan terhadap orang atau badan kepada pemerintah daerah dengan konsekuensi pemerintah daerah memberikan jasa pelayanan atau perijinan tertentu yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi.

c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, member jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan mengembangkan perekonomian daerah.

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang terbuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah di suatu bidang tertentu.

2. Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan Bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah

Untuk mengetahui potensi sumber-sumber PAD ada hal-hal yang perlu diketahui :

- 1) Kondisi awal suatu daerah
 - a) besar kecilnya keinginan pemerintah daerah untuk menetapkan pungutan.
 - b) kemampuan masyarakat untuk membayar segala pungutan-pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
 - c) Peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan PAD.
- Kegiatan ini merupakan upaya memperluas cakupan penerimaan PAD.

3. Perkembangan PDRB per kapita riil

Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar (*ability to pay*) berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah.

4. Pertumbuhan Penduduk

Besarnya pendapatan dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang ditarik akan meningkat.

5. Tingkat Inflasi

Inflasi akan meningkatkan penerimaan PAD yang penetapannya didasarkan pada omzet penjualan, misalnya pajak hotel.

6. Penyesuaian Tarif

Peningkatan pendapatan sangat tergantung pada kebijakan penyesuaian tarif. Untuk pajak atau retribusi yang tarifnya ditentukan secara tetap, maka dalam penyesuaian tarif perlu mempertimbangkan laju inflasi.

7. Pembangunan baru

Penambahan PAD juga dapat diperoleh bila pembangunan-pembangunan baru ada, seperti pembangunan pasar, pembangunan terminal, pembangunan jasa pengumpulan sampah dan lain-lain.

8. Sumber Pendapatan Baru

Adanya kegiatan usaha baru dapat mengakibatkan bertambahnya sumber pendapatan pajak atau retribusi yang sudah ada. Misalnya usaha persewaan laser disc, usaha persewaan computer/internet dan lain-lain.

9. Perubahan Peraturan

Adanya perubahan peraturan baru, khususnya yang berhubungan dengan pajak dan atau retribusi jelas akan meningkatkan PAD.

Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 pasal 6, tentang perimbangan keuangan daerah antara pemerintah pusat dan daerah, dijelaskan pula bahwa:

“Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang dikelola daerah melalui hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”.

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Untuk menuju otonomi daerah, maka pengelolaan peningkatan pendapatan asli daerah perlu semakin diintensifkan, agar tercapai keseimbangan antara pelaksana tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

Sumber pendapatan daerah berupa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Meskipun proporsi PAD maksimal hanya sebesar 20% dari total pendapatan daerah, kontribusinya terhadap pengalokasian anggaran cukup besar.⁸ Pendapatan asli daerah merupakan pencerminan terhadap pendapatan masyarakat, untuk itu perlu adanya kiat-kiat bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan masyarakat. Meningkatnya pendapatan masyarakat jelas mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sekaligus menambah pendapatan asli daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah tentunya tidak terlepas dari kemampuan pemerintah dalam membina masyarakat

⁹Abdul, Halim & syukriy Abdullah. *Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemda: Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali*, Jurnal Ekonomi STEI No.2/Tahun XIII/25.(2004)

dan unsur swasta dalam mewujudkan berbagai bidang usaha, untuk selanjutnya dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber penerimaan yang murni dari daerah, yang merupakan modal utama bagi daerah sebagai biaya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.⁹

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

B. Gambaran Umum Retribusi Daerah

1. Definisi Retribusi Daerah

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self supporting* dalam bidang keuangan dan pendapatan daerah juga tidak terlepas dari retribusi. Retribusi merupakan pembayaran atas jasa pelayanan umum yang dipungut langsung oleh pemerintah kepada wajib retribusi yang disertai dengan kontra prestasi langsung yang diberikan oleh pemerintah kepada terhadap wajib retribusi. Retribusi diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Menurut Pasal 1 ayat 28 UU No.34 tahun 2000: “Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

¹⁰Santoso Bagus, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: Citra Umbara, 1995), h. 20

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan“.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka retribusi tidak lain merupakan pemasukan yang berasal dari usaha-usaha pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan warga masyarakat baik individu maupun badan atau korporasi dengan kewajiban memberikan pengganti berupa uang sebagai pemasukan kas daerah. Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Kebijakan daerah dalam memungut retribusi harus melihat kemampuan masyarakat dalam aspek keadilan. Dalam jangka panjang, sebaiknya bisa menunjukkan dan adanya kewenangan penuh oleh pemerintah daerah sehingga dapat memberikan insentif retribusi daerah, mengupayakan menjadi daerah yang diminati oleh pelaku bisnis untuk menanamkan investasinya. Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa yang tertentu yang disediakan pemerintah.¹⁰

Retribusi merupakan suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah, dimana kita dapat melihat hubungan balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut.¹¹

Retribusi yaitu pungutan pemerintah (pusat/daerah) kepada badan atau orang berdasarkan norma-norma yang telah ditetapkan berhubungan dengan jasa

¹¹Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2010), h.25

¹²Suparmoko, *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pemerintah Daerah* (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), h.85

yang diberikan, atas permohonan secara langsung dan untuk kepentingan orang atau badan yang memerlukan.¹²

Dari pendapat dari para ahli diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan atas pemakaian atau manfaat yang diperoleh secara langsung oleh seseorang atau badan karena jasa nyata pemerintah daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, atau usaha milik daerah yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan kepada daerah.

Retribusi daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekarang ini lebih memungkinkan dan berpeluang besar untuk ditingkatkan dan dikembangkan, sehingga mampu memberikan yang lebih besar kepada PAD terutama di Daerah Kabupaten/ Kota yang mempunyai otonomi yang luas dan sekaligus untuk meningkatkan kualitas pelayanan daerah.

2. Ciri-ciri Retribusi Daerah

Dari pendapat diatas terlihat bahwa ciri-ciri mendasar dari retribusi adalah:

a. Retribusi dipungut oleh negara

Retribusi merupakan pungutan sah yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis

¹³Soelarno Slamet, *Administrasi Pendapatan Daerah* (Jakarta: STIA LAN Pres, 2003), h.26

Retribusi daerah adalah pungutan oleh pemerintah sebagai pengganti (kerugian) atas pelayanan yang diberikan oleh daerah kepada siapa saja yang membutuhkan pelayanan tersebut. Dengan demikian, terdapat suatu paksaan bagi pengguna jasa layanan untuk membayar retribusi sebagai untuk penggantian yang setimpal atas pemberian jasa layanan oleh pemerintah daerah.

c. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk

Hal ini berarti bahwa pungutan retribusi didasarkan pada suatu pelayanan yang nyata-nyata dapat dirasakan/dinikmati secara langsung oleh masyarakat pengguna jasa layanan tersebut.

d. Retribusi dikenakan pada setiap orang / badan yang menggunakan jasa-jasa yang disiapkan negara.

Retribusi dikenakan terhadap siapa saja yang telah mengenyam jasa dari pemerintah daerah. Dengan demikian, jika ingin memperoleh jasa atau memakai jasa yang disediakan oleh pemerintah barulah pemakai membayarnya, selain itu, pungutan retribusi dapat dilakukan berulang kali.

3. Objek Dan Golongan Jasa Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 Ayat 1 menentukan bahwa objek retribusi adalah berbagai jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jasa-jasa tertentu yang merupakan pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan objek retribusi.

Penggolongan jenis retribusi dimaksudkan guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetaan tarif retribusi daerah.¹³ Sesuai Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 pasal 18 ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 108 ayat 2-4, retribusi daerah dibagi atas tiga golongan, yaitu:

- a. Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka memberikan izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis-jenis retribusi daerah tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum:
 - a) Retribusi pelayanan kesehatan;
 - b) Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan;

¹⁴Marihot P Siahaan. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Jakarta, Rajawali, 2010), h.620

- c) Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan sipil;
- d) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
- e) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- f) Retribusi pelayanan pasar;
- g) Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- h) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
- i) Retribusi penggantian biaya cetak peta; dan
- j) Retribusi pengujian kapal perikanan.

2) Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha

- a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- b) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
- c) Retribusi tempat pelelangan;
- d) Retribusi terminal;
- e) Retribusi tempat khusus parkir;
- f) Retribusi tempat penginapan, pesanggrahan, villa;
- g) Retribusi penyedotan kakus;
- h) Retribusi rumah potong hewan;
- i) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal;
- j) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
- k) Retribusi penyebrangan diatas air
- l) Retribusi pengolahan limbah cair, dan;
- m) Retribusi penjualan produksi usaha daerah.

3) Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu

- a) Retribusi izin mendirikan bangunan;
- b) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
- c) Retribusi izin gangguan; dan
- d) Retribusi trayek.

Golongan atau jenis-jenis retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah berdasarkan kriteria tertentu. Penetapan jenis-jenis retribusi jasa umum dan jasa usaha dengan peraturan pemerintah dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam penerapannya sehingga dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata daerah yang bersangkutan. Adapun penetapan jenis-jenis retribusi perizinan tertentu dengan pemerintah dilakukan karena perizinan tersebut, walaupun merupakan kewenangan pemerintah daerah tetap memerlukan koordinasi dengan instansi-instansi teknis terkait.

4. Retribusi Dalam Perspektif Islam

Bila ditinjau dari segi hukum Islam maka, retribusi adalah salah satu bentuk dari pungutan yang dikenakan oleh pemerintah kepada warganya. Pada dasarnya hukumnya diperbolehkan (jaiz) selama mendatangkan kemashlahatan bagi masyarakat.

Ayat Al-Qur'an yang berkenaan tentang retribusi terdapat pada surah An-Nisa ayat 59:





Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Maksud ayat diatas, sebagai orang yang beriman kita wajib menaati selain kepada Allah dan RasulNya kita wajib menaati ulil amri (pemimpin). Pemimpin disini dapat diartikan sebagai pemerintah yang membawa kearah kebaikan/kemaslahatan umat. Selama tujuan yang dilakukan oleh pemimpin itu membawa ke arah kebaikan/ kemaslahatan wajib kita taati.

Sebagai rakyat kita harus menaati peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemimpin, salah satu peraturannya adalah kewajiban membayar retribusi. Retribusi merupakan iuran rakyat kepada pemerintah, yang tujuan dari adanya retribusi tersebut adalah sebagai salah satu pemasukan untuk Pendapatan Asli Daerah guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Gambaran Umum Pasar dan Retribusi Pasar

1. Definisi Pasar

Pengertian pasar secara konkret adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Dalam ilmu ekonomi, pengertian pasar lebih di titik beratkan pada kegiatan jual belinya. Pasar dapat terbentuk kapan dan dimana saja. Syarat-syarat terbentuknya pasar harus memenuhi 4 komponen adalah adanya penjual, pembeli,

ada barang atau jasa yang diperjualbelikan dan yang terakhir adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Pasar merupakan suatu mata rantai yang menghubungkan antara produsen dan konsumen. Ajang pertemuan antara penjual dan pembeli, antara dunia usaha dengan masyarakat konsumen. Pasar memainkan peranan yang sangat penting dalam perekonomian modern, karena harga-harga terbentuk di pasar.¹⁴

Dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 menjelaskan bahwa:

“Pasar adalah suatu area atau lokasi tertentu yang disediakan/ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai tempat jual beli barang dan jasa secara langsung dan teratur, terdiri atas pelataran, bangunan yaang berbentuk kios, los dan bentuk bangunan lainnya”.

Pasar merupakan suatu unit usaha yang memiliki peran strategis atas jalannya jaringan distribusi dari produsen ke konsumen yang membutuhkan suatu produk. Dengan demikian pasar dapat dikatakan sebagai penyedia langsung kebutuhan harian masyarakat, dan berbagai interaksi di dalamnya yang melibatkan unsure pemerintah, swasta, dan masyarakat(pedagang dan pembeli). Kondisi ini menegaskan bahwa pasar merupakan salah satu kontributor yang cukup signifikan bagi pelaksanaan pembangunan di daerah, karena melalui retribusi yang dihasilkan bias menambah pendapatan daerah. Dilihat dari proporsi

¹⁵Windhu Putra, *Ekonomi Industri* (Bandung: alfabeta, 2008)h. 51

retribusi tersebut cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat dilihat banyaknya pasar yang ada.¹⁵

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pada umumnya pasar adalah suatu tempat transaksi jual beli melibatkan produk/barang atau jasa dengan uang sebagai alat transaksi pembayaran yang sah dan disetujui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi.

2. Bentuk Pasar

Pasar dalam arti fisik merupakan tempat atau lokasi dimana para pembeli dan penjual barang berkumpul dan bertemu secara langsung, misalnya pasar-pasar tradisional dan swalayan. Sedangkan pasar dalam arti non fisik merupakan peristiwa atau proses interaksi antara pembeli dan penjual untuk mencapai kesepakatan tentang harga dan barang tidak secara langsung.

Dilihat dari organisasi penyelenggaraannya, pasar dibedakan menjadi dua yaitu pasar sempurna dan pasar tidak sempurna. Pasar sempurna adalah pasar dimana harga ditentukan oleh mekanisme penawaran dan pemerintah. Penjualan dan pembeli tidak dapat mempengaruhi pasar. Pasar sempurna memiliki beberapa syarat, yaitu:

- a. Semua penjual dan pembeli mengetahui harga penawaran dan harga permintaan.
- b. Pembeli dan penjual bebas menentukan harga atau harga ditentukan mekanisme pasar.

¹⁶ Marihot P Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Jakarta :Rajawali Pers, 2010) h.124

- c. Barang yang dijual bersifat homogen. Pasar dikatakan tidak sempurna apabila salah satu atau lebih syarat dari pasar sempurna tidak terpenuhi.

Menurut sejarah perkembangannya pasar dapat dibagi dua yaitu: (1) pasar tradisional dan (2) pasar modern. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang ditandai adanya transaksi secara langsung. Bangunnya berupa kios-kios, los pasar, dan dasaran terbuka.

Kondisi pasar ini umumnya agak kumuh dan tidak teratur. Pasar ini dikelola oleh Dinas Pasar dibawah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kotamadya. Kebanyakan menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan, buah, ikan, telur, daging, sayuran, pakaian, barang elektronik, jasa, dan sebagainya.

Pasar modern, pembeli dan penjualan tidak berinteraksi secara langsung, dimana pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang, pelayanannya secara mandiri ataupun dilayani oleh pramuniaga. Produk yang dijual biasanya tahan lama, variatif jenisnya, dan berkualitas. Konsep penggunaannya lebih modern, megah, dan teratur. Jenis pasar ini disebut swalayan, minimarket, dan hypermarket.

Perkembangan pasar modern yang tumbuh dengan pesat sangat berpengaruh negatif terhadap perkembangan pasar tradisional. Dimana konsumen dan pelanggan pasar tradisional dapat beralih ke pasar modern.

Menurut pandangan islam yang diperlukan dalam pasar adalah suatu bentuk penggunaan dan pendistribusian barang tertentu secara benar dan

produktif yang dilandasi dengan sikap niat yang ikhlas untuk mencari ridha Allah SWT.

Ciri pasar dalam islam mencerminkan hal-hal sebagai penyelesaian masalah ekonomi yang adil, artinya mekanisme yang terjadi sesuai dengan mekanisme pasar dan bersifat sempurna, berpedoman kepada ajaran islam, artinya baik pihak penjual dan pembeli mengaplikasikan nilai islam dalam praktek transaksi perdagangan, jika perlu campur tangan negara sangat penting guna menormalisasi dan memperbaiki situasi pasar yang rusak.

3. Definisi Retribusi Pasar

Retribusi Pasar atau Retribusi Pelayanan Pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Menurut penjelasan peraturan pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah sebagai pelaksanaan undang-undang nomor 34 tahun 2000 yang disempurnakan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimaksud retribusi pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los yang dikelola pemerintah daerah yang khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta. Fasilitas-fasilitas lain yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk pedagang yaitu keamanan, penerangan umum, penyediaan air, telepon, kebersihan dan penyediaan alat-alat pemadam kebakaran.

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut pembayaran atas jasa pelayanan pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah. Objek retribusi pasar adalah setiap pemanfaatan sarana/fasilitas pasar yang disediakan dan dimiliki oleh

pemerintah daerah. Subjek retribusi pasar adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas/sarana pasar.

4. Klasifikasi Retribusi Pasar

Klasifikasi retribusi pasar adalah sebagai berikut:¹⁶

a. Menurut sifat prestasi negara

Retribusi pasar adalah retribusi untuk penggunaan berbagai bangunan. Pedagang sebagai pembayaran retribusi pasar menerima prestasi dari pemerintah daerah berupa penggunaan bangunan pasar maupun fasilitas lain yang disediakan oleh pemerintah.

b. Menurut cara menentukan jumlah pungutan

Retribusi pasar, Variabel jumlah pungutan tersebut tergantung dari kelas pasar, luas kios, golongan dagang serta tempat berdagang

c. Menurut cara pembayaran

Retribusi pasar termasuk retribusi kontan. Pemakai jasa bukan kios menggunakan sistem pembayaran harian/mingguan.

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Retribusi Pasar

Faktor-faktor yang mempengaruhi retribusi pasar adalah sebagai berikut:¹⁷

a. Subyek dan obyek retribusi

¹⁷Caroline, *Analisis Kinerja Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Salatiga* (Semarang: Tesis Universitas Diponegoro, 2005)h. 22

¹⁸Caroline, *Analisis Kinerja Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Salatiga* (Semarang: Tesis Universitas Diponegoro, 2005)h. 24

Subyek dan obyek retribusi akan menentukan besarnya “*tak base*” yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan besar kecilnya beban retribusi yang harus dibayar oleh subyek retribusi. Subyek retribusi disini adalah para pedagang yang berjualan di dalam pasar dan berada di sekitar pasar. Obyek retribusi yang dimaksud adalah lokasi pasar, lokasi kios, los, dan dasaran.

b. Tarif retribusi

Dalam penentuan tarif retribusi harus bersifat progresif. Dalam retribusi pasar progresifitas berdasarkan pada lokasi/tempat untuk berdagang. Pemakaian tempat berdagang, lokasi berdagang dalam kategori strategi dan nonstrategi yang ditentukan oleh letak tempat, yang berada di bangunan utama, los terbuka atau dasaran terbuka serta luas tempat yang digunakan pedagang.

c. Sistem pemungutan retribusi

Pemungutan retribusi yang baik tidak terlepas dari prinsip-prinsip pemungutan. Prinsip-prinsip pemungutan pajak/retribusi yang digunakan oleh Adam Smith atau lebih dikenal dengan *smith's canons* yaitu:

1) Prinsip keadilan (*equity*)

Yaitu adanya kesamaan manfaat, kesamaan rill yang diterima dan keadilan dalam kemampuan membayar retribusi.

2) Prinsip kepastian (*certainty*)

Yaitu persyaratan administrasi/prinsip kepastian hukum, artinya pungutan hendaknya bersifat tegas, jelas dan pasti bagi pemakai jasa yang meliputi besarnya tarif, waktu pemungutan, petugas pemungut, tempat pembayaran

dan lain-lain. Hal ini akan mempermudah pembayar, petugas dan pemerintah, dalam membuat laporan.

3) Prinsip kelayakan (*convenience*)

Yaitu pungutan yang dilakukan hendaknya pada waktu yang tepat dan menyenangkan, dan tarif yang ditetapkan hendaknya jangan terlalu menekan subyek penderita.

4) Prinsip ekonomi (*economy*)

Yaitu perlu diperhatikan tentang efisiensi dan efektivitas dalam penarikan retribusi.

D. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah

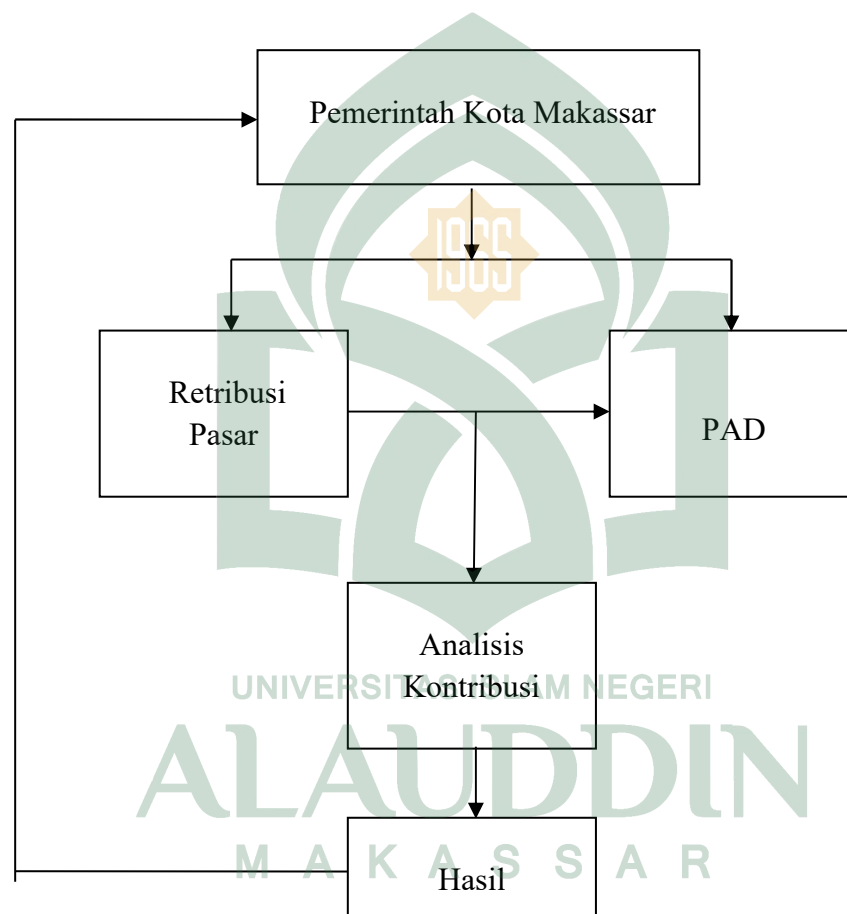
Kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar bagian dari Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumbangan dari pos retribusi pasar. Kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah dapat kita lihat dengan membandingkan realisasi penerimaan retribusi pasar dengan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dikalikan 100%.¹⁸

¹⁹Abdul Halim, *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2002) h.163

E. *Kerangka Pikir*

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan penulis, dimunculkan kerangka berfikir untuk menjelaskan pengaruh kontribusi retribusi pasar terhadap PAD di Kota Makassar. Berikut gambar pemikiran skematis:

Gambar 1 Kerangka Pikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini, jenis penelitian yang di gunakan untuk mengetahui kontribusi retribusi pasar terhadap PAD Kota Makassar adalah jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode ilmiah/*scientific* karna telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistimatis.¹⁹

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar dengan pertimbangan bahwa Kota Makassar adalah salah satu daerah yang cukup potensial dalam mengembangkan penerimaan daerah dari sektor retribusi, khususnya retribusi pasar.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder atau data pendukung yang diperoleh dengan cara memanfaatkan data atau arsip-arsip dari instansi yang terkait dengan permasalahan tersebut seperti, Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Makassar, dan PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar selaku pengelola retribusi pasar.

²⁰ Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. (Bandung:CV. Alfabeta, 2012) h. 11

Data skunder adalah pengumpulan data dengan mempelajari masalah yang berhubungan dengan objek yang diteliti²⁰

D. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data dalam peneitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen-dokumen, atau bukti tertulis berupa laporan data, khususnya data mengenai Retribusi Pasar, Retribusi Daerah dan PAD lima tahun terakhir. Perlu ditegaskan bahwa data yang dimaksud merupakan data yang bersifat nasional yang diambil dari dinas yang terkait, yaitu:DISPENDA Kota Makassar, dan PD>. Pasar Makassar Raya Kota Makassar.

E. Teknik Analisis Data

Kontribusi dapat di hitung dengan rumus sebagai berikut.²¹

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Retribusi pasar}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

Dan

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Objek Pasar}}{\text{Retribusi Pasar}} \times 100\%$$

Analisis kontribusi yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dapat disumbangkan dari penerimaan Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar, dan untuk mengetahui

²¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta 2010) h. 8

²²Abdul Halim, *Rumus Kontribusi*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi, 2001)h. 56

seberapa besar kontribusi di setiap objek pasar terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Makassar.²²



²³Budiyuwono, *Pengertian Analisis Kontribusi*, (Jakarta: K, 1995) h. 78

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum

1. Letak Geografis dan Batas Wilayah

Kota Makassar terletak antara 109°24'17'38" Bujur Timur dan 5°8'6'19" Lintang Selatan, yang berbatasan sebelah utara dengan Kabupaten Maros, sebelah timur Kabupaten Maros, sebelah selatan Kabupaten Gowa, dan sebelah barat adalah Selat Makassar.

Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 Km persegi yang meliputi 14 Kecamatan.

Tabel 4 Luas Wilayah Kota Makassar Menurut Kecamatan tahun 2013

No	Kecamatan	Luas	Persentase
1	Mariso	1,82	1,04
2	Mamajang	2,25	1,28
3	Tamalate	20,21	11,50
4	Rappocini	9,23	5,25
5	Makassar	2,52	1,43
6	Ujung Pandang	2,63	1,50
7	Wajo	1,99	1,13
8	Bontoala	2,10	1,19
9	Ujung Tanah	5,94	3,38
10	Tallo	5,83	3,32
11	Panakkukan	17,05	9,70
12	Manggala	24,14	13,73
13	Biringkanaya	48,22	27,43
14	Tamalanrea	31,84	18,12

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, 2014.

2. Iklim

Kota Makassar berdasarkan pencatatan stasiun meteorologi Maritim Paotere, secara rata-rata kelembapan udara sekitar 81%, temperature udara sekitar 23,5°-33,2°c, dan rata-rata kecepatan angin 4,6 knot.

3. Penduduk

Berdasarkan pada data Makassar dalam angka 2014, penduduk Kota Makassar tahun 2013 tercatat sebanyak 1.408.072 jiwa yang terdiri 695.955 laki-laki dan 712.117 perempuan.

Tabel 5 Jumlah Penduduk Kota Makassar Menurut Kecamatan tahun 2013

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1	Mariso	57.790
2	Mamajang	60.236
3	Tamalate	183.039
4	Rappocini	158.325
5	Makassar	83.550
6	Ujung Pandang	27.802
7	Wajo	30.258
8	Bontoala	55.578
9	Ujung Tanah	48.133
10	Tallo	137.260
11	Panakkukan	145.132
12	Manggala	127.915
13	Biringkanaya	185.030
14	Tamalanrea	108.024

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, 2014.

4. Pasar

Di Kota Makassar perkembangan pasar dapat dikatakan baik mengingat peran pasar yang tidak tergeser oleh swalayan atau toko-toko besar pada perkembangan era modern ini. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pasar di

Kota Makassar, bahkan dalam tahun penelitian yang di sajikan penulis terjadi peningkatan jumlah pasar.

Dalam penelitian ini penulis menyajikan data 15 pasar di Kota Makassar tahun 2010-2014 yang dikelola PD. Pasar Makassar Raya.

Tabel 6 Data Pasar dan Potensi Pedagang di Kota Makassar

No	Pasar	Luas	Jumlah Pedagang
1	Makassar Mall	24.820 m ²	1.141
2	Terong	13.253 m ²	1.682
3	Butung	7.432 m ²	1.033
4	Kampung Baru	5.091 m ²	301
5	Pannampu	49.920 m ²	268
6	Kalimbu	5.770 m ²	225
7	Sambung Jawa	2.426 m ²	390
8	Maricaya	2.753 m ²	374
9	Sawah	2434 m ²	322
10	Pa'baeng-baeng	21.600 m ²	412
11	Parang Tambung	8.820 m ²	418
12	Panakkukang	9.122 m ²	597
13	Niaga Daya	84.000 m ²	1.347
14	Mandai	3.231 m ²	401
15	Darurat Utara	-	421

Sumber: PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar, 2009

B. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sebagaimana diketahui bahwa dalam penyelenggaraan rumah tangga daerah, selalu membutuhkan biaya yang cukup besar karena itu untuk mencakup keperluan penyelenggaraan rumah tangga daerah bersangkutan, maka dibutuhkan pembiayaan sebagaimana tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada setiap daerah, pendapatan asli daerah adalah pungutan yang dilakukan berdasarkan pendapatan daerah.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, daerah tersebut memiliki sumber keuangan sendiri, sekurang-kurangnya untuk menutupi anggaran rutin daerah sehingga tidak tergantung pada subsidi dan sumbangan dari pemerintah pusat atau propinsi. Oleh sebab itu, diharapkan pada pemerintah daerah agar berusaha memanfaatkan pendapatan asli daerahnya, berusaha mengelolanya dengan baik agar bisa memberikan hasil yang bisa mencukupi kebutuhan APBD.

Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah Kota Makassar dalam mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut, dan perkembangan di dalam menunjang pelaksanaan pembangunan serta jalannya roda pemerintahan di Kota Makassar berikut ini penulis menyajikan data tentang perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

**Tabel 7 Data Target dan Realisasi PAD
Kota Makassar 2010-2014 (Rupiah)**

Tahun	Target	Realisasi
2010	216.928.890.000	210.136.331.088
2011	345.335.311.000	351.692.552.588
2012	441.234.952.000	484.972.799.508
2013	569.727.462.000	627.241.924.947
2014	608.955.576.000	608.956.221.212

Sumber : *DISPENDA Kota Makassar (diolah), 2009.*

C. Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui kontribusi penerimaan retribusi pasar dalam mendukung penerimaan pendapatan asli daerah. Analisis ini diuji dengan menghitung dan membandingkan antara realisasi penerimaan retribusi pasar dengan total penerimaan PAD dengan rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Retribusi pasar}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

1. Hasil Analisis Kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Makassar dari tahun 2010-2014.

- a. Kontribusi penerimaan retribusi pasar pada tahun 2010:

$$= \frac{5.294.025.400}{210.136.331.088} \times 100\%$$

$$= 2,52$$

- b. Kontribusi penerimaan retribusi pasar pada tahun 2011:

$$= \frac{4.690.429.675}{351.692.552.588} \times 100\%$$

$$= 1,34$$

- c. Kontribusi penerimaan retribusi pasar pada tahun 2012:

$$= \frac{5.569.987.300}{484.972.799.508} \times 100\%$$

$$= 1,15$$

- d. Kontribusi penerimaan retribusi pasar pada tahun 2013:

$$= \frac{7.436.110.500}{627.241.924.947} \times 100\%$$

$$= 1,19$$

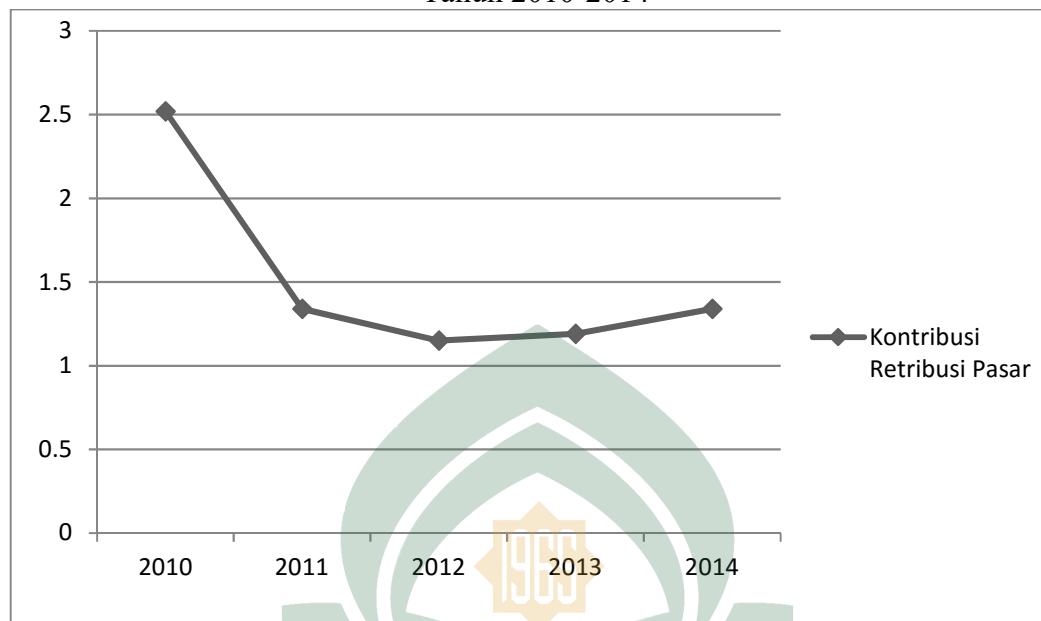
- e. Kontribusi penerimaan retribusi pasar pada tahun 2014:

$$= \frac{8.091.032.500}{608.956.221.212} \times 100\%$$

$$= 1,34$$

Berdasarkan hasil perhitungan kontribusi penerimaan retribusi pasar diatas, maka dapat dirangkum dalam gambar seperti di bawah ini:

Gambar 2 Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap PAD Kota Makassar Tahun 2010-2014



Sumber : DISPENDA dan PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar, 2009

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Makassar pada tahun 2010 sebesar 2,52 persen, sedangkan pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 1,34 persen, pada tahun 2012 menurun menjadi sebesar 1,15 persen, sedangkan pada tahun 2013 dan 2014 mengalami peningkatan secara perlahan sebesar 1,19 dan 1,34 persen.

Secara umum dapat kita simpulkan bahwa kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Makassar selama tahun pengamatan yaitu dari tahun 2010-2014 cenderung mengalami penurunan, dan rata-rata kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah relatif kecil sebesar 1,51 persen.

2. Pembahasan Analisis Kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Makassar dari tahun 2010-2014.

Untuk mengetahui secara eksplisit kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), digunakan persamaan kontribusi objek pasar terhadap retribusi pasar di kota Makassar untuk mengetahui seberapa besar kontribusi objek pasar terhadap total retribusi pasar di kota Makassar selama tahun 2010 – 2014.

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Objek Pasar}}{\text{Retribusi Pasar}} \times 100\%$$

- a. Kontribusi Pasar Makassar Mall terhadap Retribusi pasar di Kota Makassar pada tahun 2010-2014.

Kontribusi Pasar Makassar Mall terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Makassar dapat di hitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

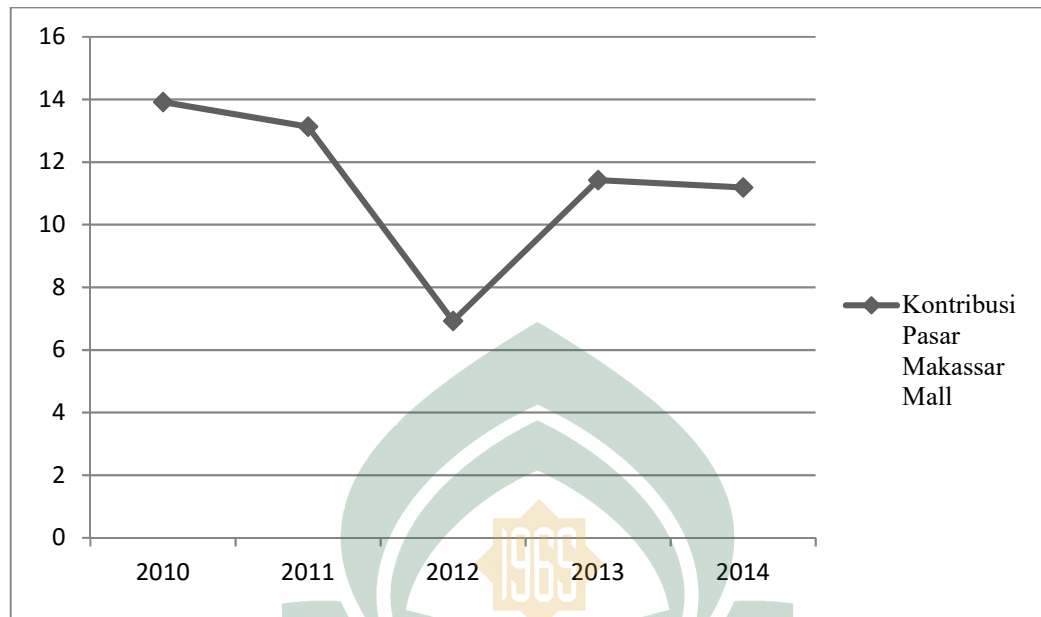
$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pasar Makassar Mall}}{\text{Retribusi Pasar}} \times 100\%$$

Tabel 8 Kontribusi Pasar Makassar Mall terhadap penerimaan Retribusi pasar di Kota Makassar pada Tahun 2010-2014.

Tahun	Pasar Makassar Mall (Rupiah)	Retribusi Pasar (Rupiah)	Hasil (%)
2010	736.636,500	529.402,5400	13,92
2011	615.467,075	469.042,9675	13,13
2012	385.593,000	556.998,7300	6,93
2013	849.602,500	743.611,0500	11,43
2014	905.212,000	809.103,2500	11,19

Sumber: PD Pasar Makassar Raya Kota Makassar (diolah), 2009

Gambar 3 Kontribusi Pasar Makassar Mall di Kota Makassar.



Sumber: PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar (diolah), 2009

Dari tabel dan gambar di atas menunjukkan bahwa kontribusi Pasar Makassar Mall terhadap penerimaan retribusi pasar di Kota Makassar pada tahun 2010 sebesar 13,92 persen, sedangkan pada tahun 2011 menurun sebesar 11,31 persen, pada tahun 2012 mengalami penurunan yang cukup drastis sebesar 6,93 persen, sedangkan pada tahun 2013 kembali mengalami kenaikan sebesar 11,49 persen dan pada tahun 2014 kembali menurun menjadi 11,19 persen.

- b. Kontribusi Pasar Terong terhadap penerimaan retribusi pasar di Kota Makassar pada tahun 2010-2014.

Kontribusi Pasar Terong terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Makassar dapat di hitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

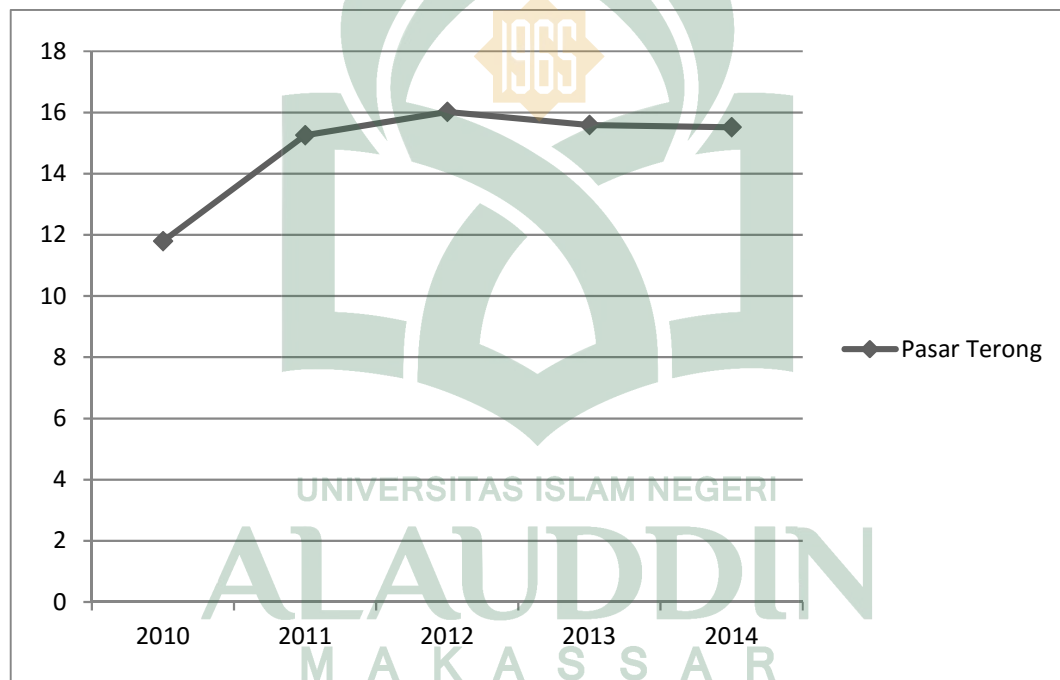
$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pasar Terong}}{\text{Retribusi Pasar}} \times 100\%$$

Tabel 9 Kontribusi pasar terong terhadap Penerimaan retribusi pasar di Kota Makassar pada tahun 2010-2014.

Tahun	Pasar Terong (Rupiah)	Retribusi Pasar (Rupiah)	Hasil (%)
2010	623.942,000	529.402,5400	11,79
2011	715.738,000	469.042,9675	15,26
2012	892.208,000	556.998,7300	16,02
2013	115.860,1000	743.611,0500	15,59
2014	125.540,6000	809.103,2500	15,52

Sumber: PD Pasar Makassar Raya Kota Makassar, 2009

Gambar 4 Kontribusi Pasar terong di Kota Makassar



Sumber: PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar (diolah), 2009.

Dari tabel dan gambar di atas menunjukkan kontribusi pasar terong terhadap penerimaan retribusi pasar pada tahun 2010 sebesar 11,79 persen, sedangkan pada tahun 2011 meningkat menjadi 15,26 persen. Pada tahun 2012 sebesar 16,02 persen, sedangkan pada tahun 2013 terjadi penurunan sebesar 15,59

persen, dan pada tahun 2014 kembali mengalami penurunan menjadi 15,52 persen.

- c. Kontribusi pasar Butung terhadap penerimaan retribusi pasar di Kota Makassar pada tahun 2010-2014.

Kontribusi Pasar Butung terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Makassar dapat di hitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

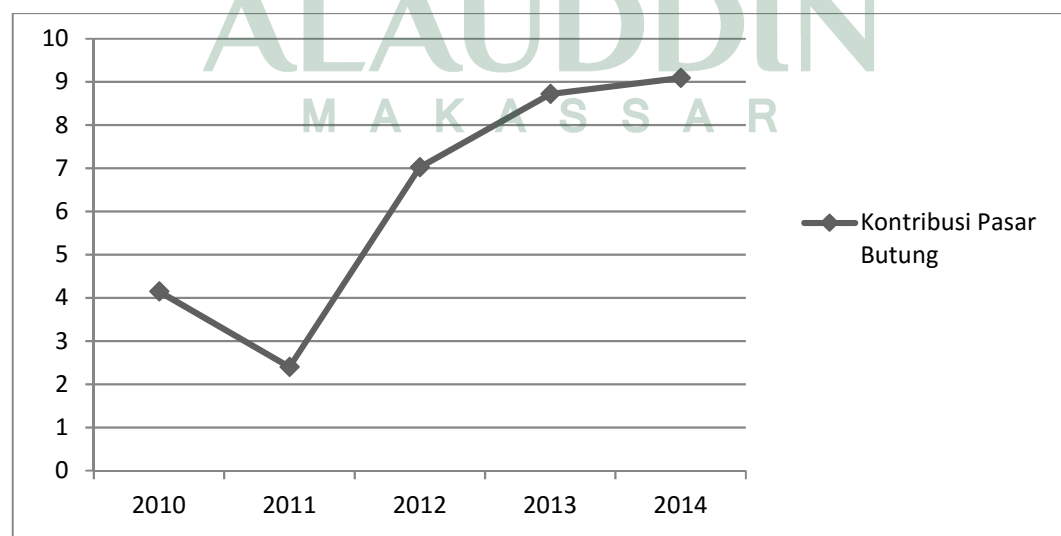
$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pasar Butung}}{\text{Retribusi Pasar}} \times 100\%$$

Tabel 10 Kontribusi pasar butung terhadap Penerimaan retribusi pasar di Kota Makassar pada tahun 2010-2014.

Tahun	Pasar Butung (Rupiah)	Retribusi Pasar (Rupiah)	Hasil (%)
2010	219.419,000	529.402,5400	4,15
2011	112.342,500	469.042,9675	2,40
2012	390.550,000	556.998,7300	7,02
2013	648.376,000	743.611,0500	8,72
2014	734.868,000	809.103,2500	9,09

Sumber: PD Pasar Makassar Raya Kota Makassar (diolah), 2009

Gambar 5 Kontribusi pasar butung di Kota Makassar.



Sumber: PD Pasar Makassar Raya Kota Makassar (diolah), 2009.

Dari tabel dan gambar di atas menunjukkan kontribusi Pasar Butung terhadap penerimaan Retribusi Pasar di Kota Makassar pada tahun 2010 4,15 persen, sedangkan pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 2,40 persen. Pada tahun 2012 kembali meningkat menjadi 7,02 persen, sedangkan pada tahun 2013 meningkat menjadi 8,72 persen, dan pada tahun 2014 terus mengalami peningkatan menjadi 9,09 persen.

- d. Kontribusi pasar Kampung Beru terhadap penerimaan Retribusi Pasar di Kota Makassar pada tahun 2010-2014.

Kontribusi Pasar Kampung Beru terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Makassar dapat di hitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

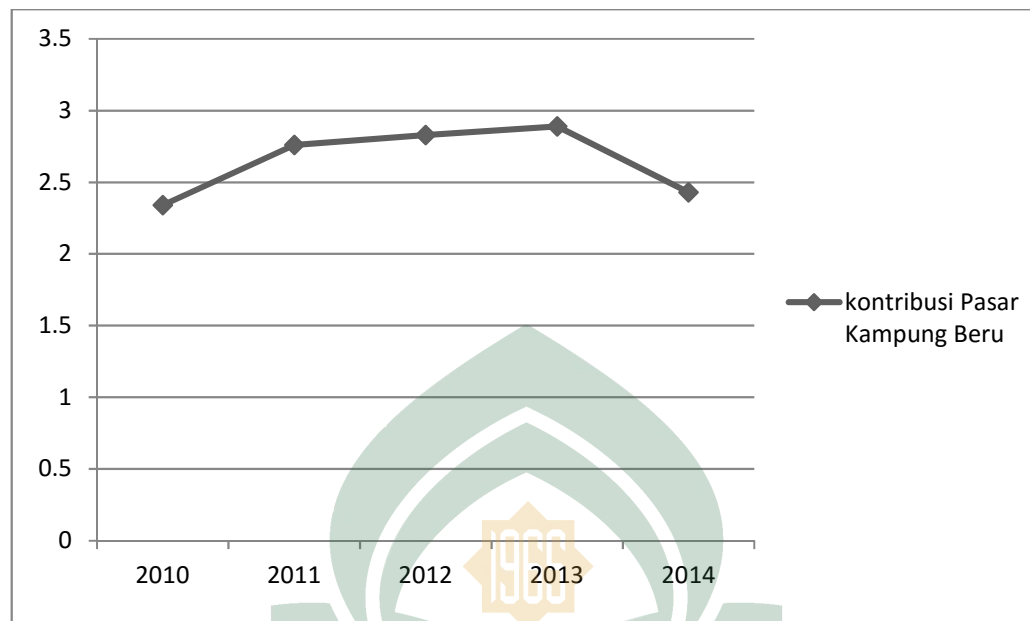
$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pasar Kampung Beru}}{\text{Retribusi Pasar}} \times 100\%$$

Tabel 11 Kontribusi Pasar Kampung Beru terhadap Penerimaan retribusi pasar di Kota Makassar pada tahun 2010-2014.

Tahun	Pasar Kampug Beru (Rupiah)	Retribusi Pasar (Rupiah)	Hasil (%)
2010	123.579,000	529.402,5400	2,34
2011	129.049,000	469.042,9675	2,76
2012	157.471,500	556.998,7300	2,83
2013	214.329,500	743.611,0500	2,89
2014	196.258,000	809.103,2500	2,43

Sumber: PD. Pasar Raya Kota Makassar (diolah), 2009.

Gambar 6 Kontribusi Pasar Kampung Beru di Kota Makassar.



Sumber: PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar (diolah), 2009.

Dari tabel dan gambar di atas menunjukkan kontribusi Pasar Kampung Beru terhadap penerimaan Retribusi Pasar di Kota Makassar pada tahun 2010 sebesar 2,34 persen, sedangkan pada tahun 2011 meningkat sebesar 2,76 persen. Pada tahun 2012 meningkat menjadi 2,83 persen, sedangkan pada tahun 2013 meningkat sebesar 2,89 persen, dan pada tahun 2014 terus mengalami peningkatan sebesar 2,43 persen.

e. Kontribusi Pasar Panampu terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Makassar pada tahun 2010-2014.

Kontribusi Pasar Panampu terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Makassar dapat di hitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

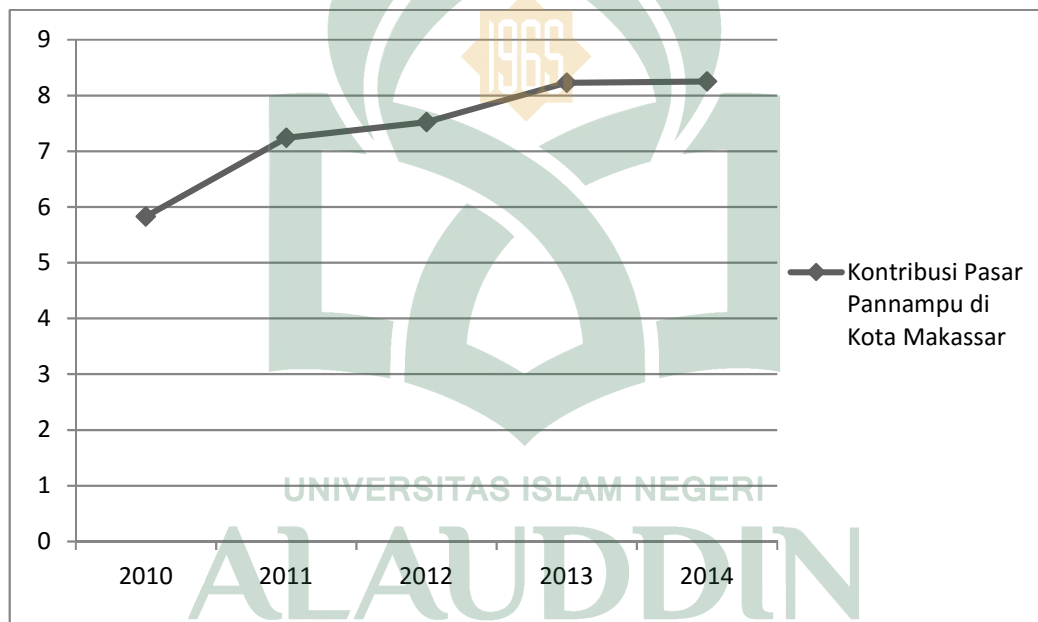
$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pasar Panampu}}{\text{Retribusi Pasar}} \times 100\%$$

Tabel 12 Kontribusi Pasar Pannampu terhadap Penerimaan retribusi pasar di Kota Makassar pada tahun 2010-2014.

Tahun	Pasar Pannampu (Rupiah)	Retribusi Pasar (Rupiah)	Hasil (%)
2010	308.354,500	529.402,5400	5,83
2011	339.374,500	469.042,9675	7,24
2012	418.434,300	556.998,7300	7,52
2013	611.818,900	743.611,0500	8,23
2014	666.934,600	809.103,2500	8,25

Sumber: PD. Pasar Raya Kota Makassar (diolah), 2009.

Gambar 7 Kontribusi pasar Pannampu di Kota Makassar.



Sumber: PD. Pasar Makassar Raya kota Makassar (diolah), 2009.

Dari tabel dan gambar di atas menunjukkan kontribusi Pasar Pannampu terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Makassar pada tahun 2010 sebesar 5,83 persen, sedangkan pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 7,24 persen, pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 7,52 persen, sedangkan pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 8,23 persen, dan pada tahun 2014 terus mengalami kenaikan sebesar 8,25 persen.

- f. Kontribusi Pasar Kalimbu terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Makassar pada tahun 2010-2013.

Kontribusi Pasar Kalimbu terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Makassar dapat di hitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

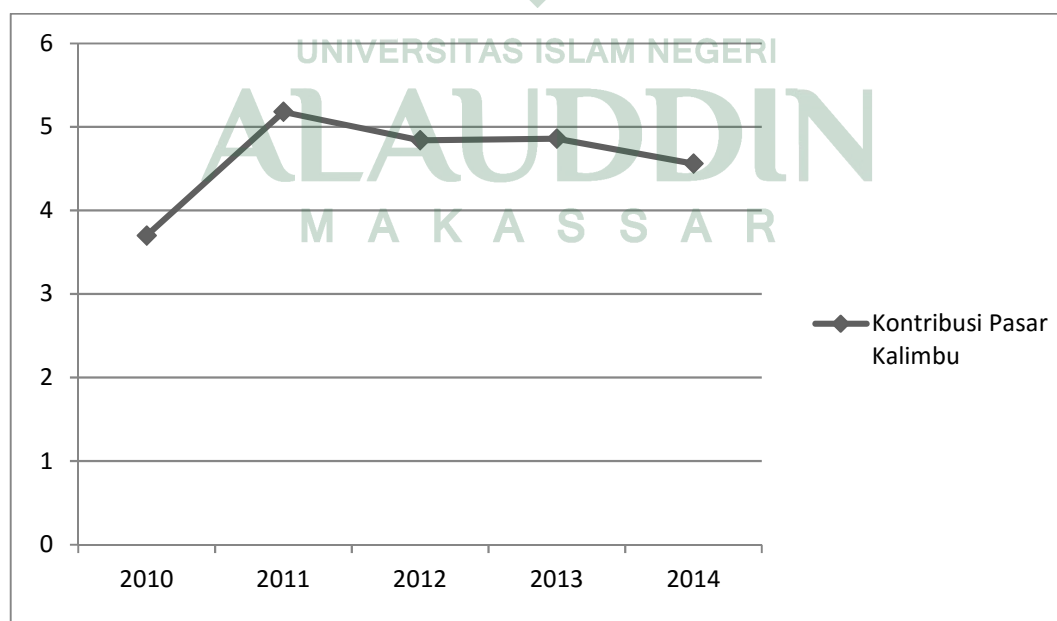
$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pasar Kalimbu}}{\text{Retribusi Pasar}} \times 100\%$$

Tabel 13 Kontribusi Pasar Kalimbu terhadap Penerimaan retribusi pasar di Kota Makassar pada tahun 2010-2014.

Tahun	Pasar Kalimbu (Rupiah)	Retribusi Pasar (Rupiah)	Hasil (%)
2010	195.639,000	529.402,5400	3,70
2011	242.651,000	469.042,9675	5,18
2012	269.560,500	556.998,7300	4,84
2013	361.301,500	743.611,0500	4,86
2014	382.130,500	809.103,2500	4,73

Sumber: PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar (diolah),2009.

Gambar 8 Kontribusi Pasar Kalimbu di Kota Makassar.



Sumber: PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar (diolah), 2009.

Dari tabel dan gambar di atas menunjukkan kontribusi Pasar Kalimbu terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Makassar pada tahun 2010 sebesar 3,70 persen, sedangkan pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 5,18 persen, pada tahun 2012 menurun sebesar 4,84 persen, sedangkan pada tahun 2013 kembali meningkat sebesar 4,86, dan pada tahun 2014 kembali mengalami penurunan sebesar 4,73 persen.

g. Kontribusi Pasar Sambung Jawa terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Makassar pada 2010-2014.

Kontribusi Pasar Sambung Jawa terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Makassar dapat di hitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

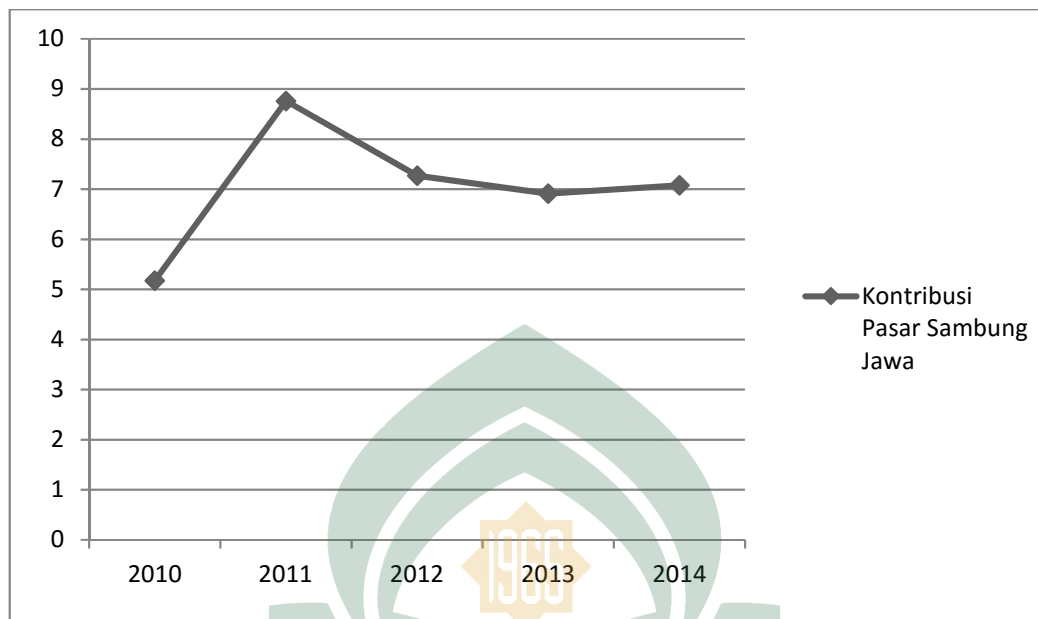
$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pasar Sambung Jawa}}{\text{Retribusi Pasar}} \times 100\%$$

Tabel 14 Kontribusi Pasar Sambung Jawa terhadap Penerimaan retribusi pasar di Kota Makassar pada tahun 2010-2014.

Tahun	Pasar Sambung Jawa (Rupiah)	Retribusi Pasar (Rupiah)	Hasil (%)
2010	273.535000	529.402,5400	5,17
2011	410.671000	469.042,9675	8,76
2012	404.538000	556.998,7300	7,27
2013	513.516,500	743.611,0500	6,91
2014	572.6635,00	809.1032,500	7,08

Sumber: PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar (diolah), 2009.

Gambar 9 Kontribusi Pasar Sambung Jawa di Kota Makassar.



Sumber: PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar (diolah), 2009.

Dari tabel dan gambar di atas menunjukkan kontribusi Pasar Sambung Jawa terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Makassar pada tahun 2010 sebesar 5,17 persen, sedangkan pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 8,76 persen. Pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 7,27 persen, sedangkan pada tahun 2013 masih mengalami penurunan sebesar 6,91 persen, dan pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 7,08 persen.

h. Kontribusi Pasar Maricayya terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Makassar pada tahun 2010-2014.

Kontribusi Pasar Maricayya terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Makassar dapat di hitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

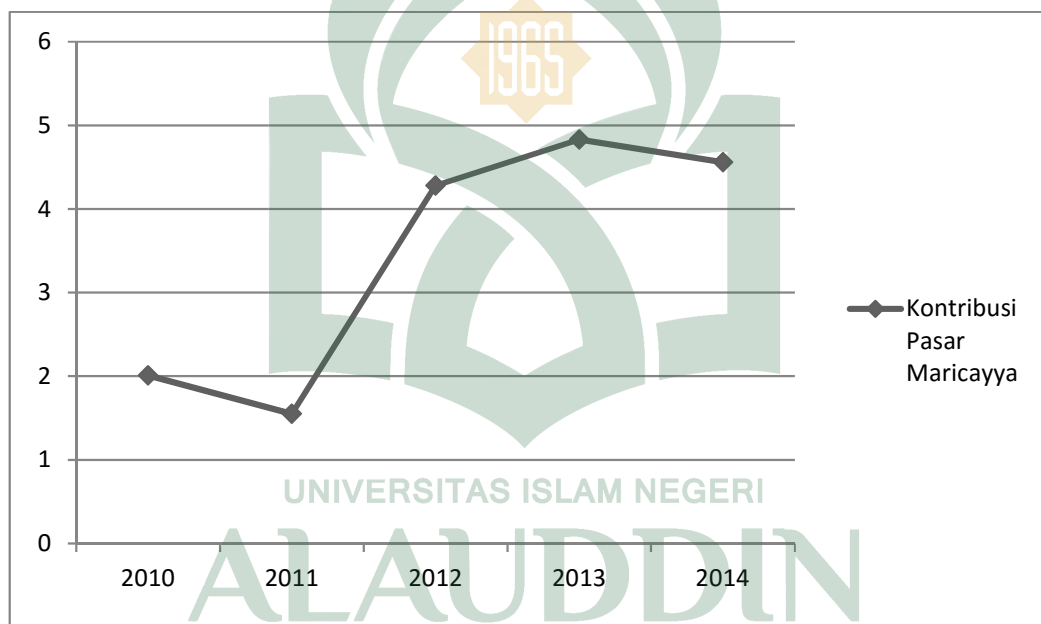
$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pasar Maricayya}}{\text{Retribusi Pasar}} \times 100\%$$

Tabel 15 Kontribusi Pasar Maricayya terhadap Penerimaan retribusi pasar di Kota Makassar pada tahun 2010-2014.

Tahun	Pasar Maricayya (Rupiah)	Retribusi Pasar (Rupiah)	Hasil (%)
2010	106.213,000	529.402,5400	2,01
2011	725.140,00	469.042,9675	1,55
2012	238058000	556.998,7300	4,28
2013	359.122,500	743.6110500	4,83
2014	368.250,400	809.103,2500	4,58

Sumber: PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar (diolah), 2009.

Gambar 10 Kontribusi Pasar Maricayya di Kota Makassar



Sumber: PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar (diolah), 2009.

Dari tabel dan gambar di atas menunjukkan kontribusi Pasar Maricayya terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Makassar pada tahun 2010 sebesar 2,10 persen, sedangkan pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 1,55 persen. Pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 4,28 persen, sedangkan pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 4,83 persen, dan pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 4,56 persen.

- i. Kontribusi Pasar Sawah terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Makassar pada tahun 2010-2014.

Kontribusi Pasar Sawah terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Makassar dapat di hitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

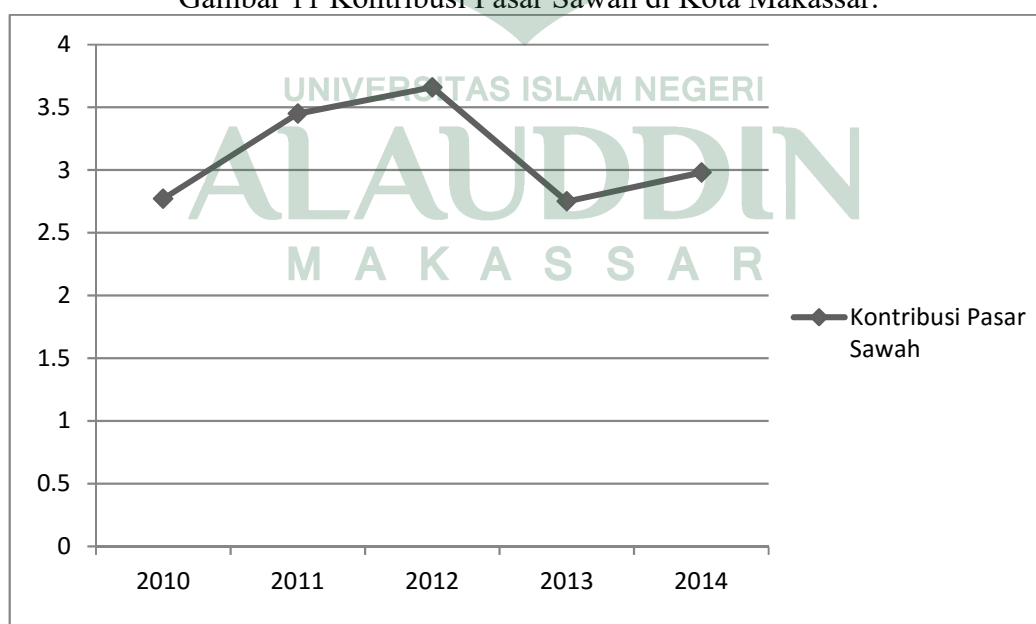
$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pasar Sawah}}{\text{Retribusi Pasar}} \times 100\%$$

Tabel 16 Kontribusi Pasar Sawah terhadap Penerimaan retribusi pasar di Kota Makassar pada tahun 2010-2014.

Tahun	Pasar Sawah (Rupiah)	Retribusi Pasar (Rupiah)	Hasil (%)
2010	146.231,300	529.402,5400	2,77
2011	161.664,500	469.042,9675	3,45
2012	203.468,000	556.998,7300	3,66
2013	204.349,500	743.611,0500	2,75
2014	240.547,500	809.103,2500	2,98

Sumber: PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar (diolah), 2009.

Gambar 11 Kontribusi Pasar Sawah di Kota Makassar.



Sumber: PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar (diolah), 2009.

Dari tabel dan gambar di atas menunjukkan kontribusi Pasar Sawah terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Makassar Pada tahun 2010 sebesar 2,77 persen, sedangkan pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 3,45 persen. Pada tahun 2012 kembali mengalami kenaikan sebesar 3,66 persen, sedangkan pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 2,75 persen, dan pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 2,98 persen.

j. Kontribusi Pasar Pa'baeng-baeng terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Makassar pada tahun 2010-2014.

Kontribusi Pasar Pa'baeng-baeng terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Makassar dapat di hitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

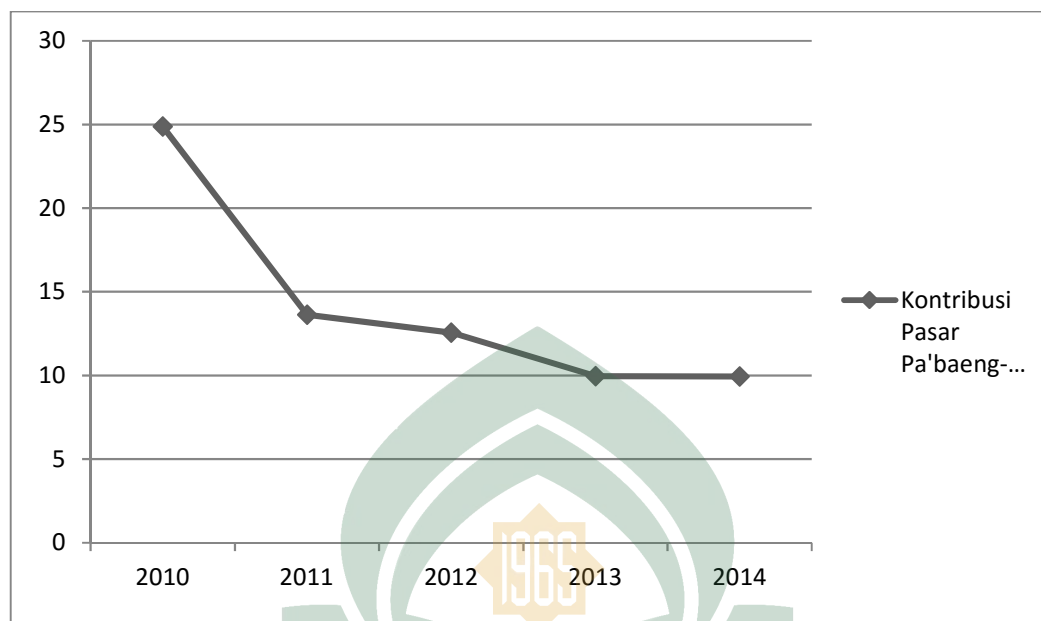
$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pasar Pa'baeng - baeng}}{\text{Retribusi Pasar}} \times 100\%$$

Tabel 17 Kontribusi Pasar Pa'baeng-baeng terhadap Penerimaan retribusi pasar di Kota Makassar pada tahun 2010-2014.

Tahun	Pasar Pa'baeng-baeng (Rupiah)	Retribusi Pasar (Rupiah)	Hasil (%)
2010	131.735,6000	529.402,5400	24,89
2011	638.931,000	469.042,9675	13,63
2012	693.426,000	556.998,7300	12,45
2013	739.765,500	743.611,0500	9,95
2014	804.081,500	809.103,2500	9,94

Sumber: PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar (diolah), 2009.

Gambar 12 Kontribusi Pasar Pa'baeng-baeng di Kota Makassar.



Sumber: PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar (diolah), 2009

Dari tabel dan gambar di atas menunjukkan kontribusi Pasar Pa'baeng-baeng terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Makassar pada tahun 2010 sebesar 24,89 persen, sedangkan pada tahun 2011 menurun menjadi 13,63 persen. Pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 12,45 persen, sedangkan pada tahun 2013 terus mengalami penurunan sebesar 9,95 persen, dan pada tahun 2014 kembali menurun sebesar 9,94 persen.

- k. Kontribusi Pasar Parang Tambung terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Makassar pada tahun 2010-2014.

Kontribusi Pasar Parang Tamung terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Makassar dapat di hitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

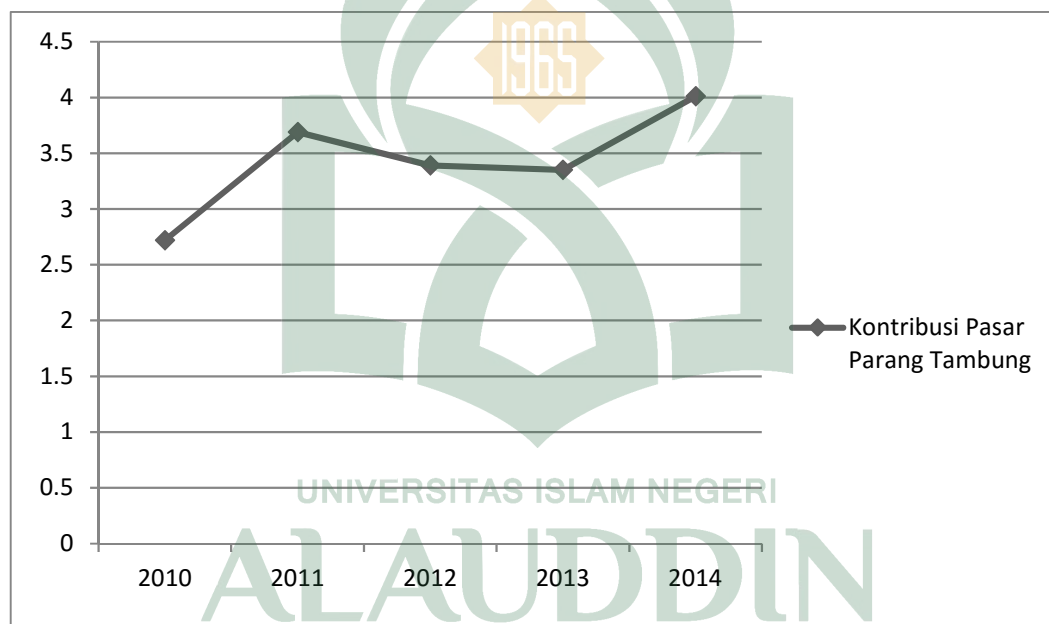
$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pasar Parang Tambung}}{\text{Retribusi Pasar}} \times 100\%$$

Tabel 18 Kontribusi Pasar Parang Tambung terhadap Penerimaan retribusi pasar di Kota Makassar pada tahun 2010-2014.

Tahun	Pasar Parang Tambung (Rupiah)	Retribusi Pasar (Rupiah)	Hasil (%)
2010	143.980,500	529.402,5400	2,72
2011	172.714,500	469.042,9675	3,69
2012	188.528,000	556.998,7300	3,39
2013	248.793,000	743.611,0500	3,35
2014	324.254,000	809.103,2500	4,01

Sumber: PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar (diolah), 2009.

Gambar 13 Kontribusi Pasar Parang Tambung di Kota Makassar.



Sumber: PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar (diolah), 2009.

Dari tabel dan gambar di atas menunjukkan kontribusi Pasar Parang Tambung terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Makassar pada tahun 2010 sebesar 2,72 persen, sedangkan pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 3,69 persen. Pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 3,39 persen, sedangkan pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 3,35 persen, dan pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 4,01 persen.

1. Kontribusi Pasar Panakkukang terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Makassar pada tahun 2010-2014.

Kontribusi Pasar Panakkukang terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Makassar dapat di hitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

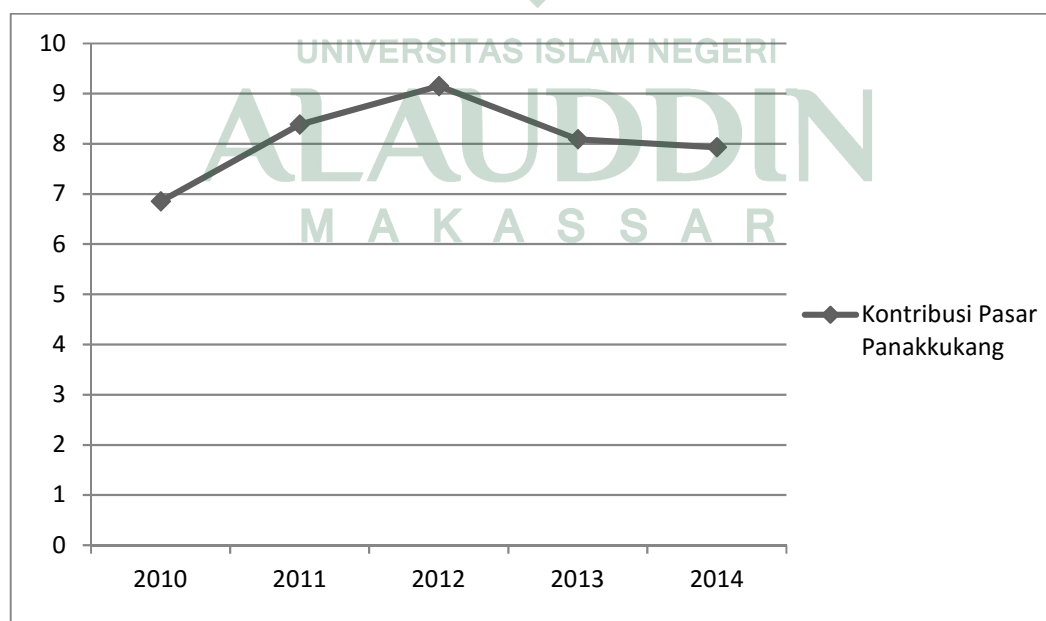
$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pasar Panakkukang}}{\text{Retribusi Pasar}} \times 100\%$$

Tabel 19 Kontribusi Pasar Panakkukang terhadap Penerimaan retribusi pasar di Kota Makassar pada tahun 2010-2014.

Tahun	Pasar Panakkukang (Rupiah)	Retribusi Pasar (Rupiah)	Hasil (%)
2010	362.144,500	529.402,5400	6,85
2011	392.695,500	469.042,9675	8,38
2012	509.231,500	556.998,7300	9,15
2013	601.283,000	743.611,0500	8,09
2014	641.393,500	809.103,2500	7,93

Sumber: PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar (diolah), 2009.

Gambar 14 Kontribusi Pasar Panakkukang di Kota Makassar.



Sumber: PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar (diolah), 2009.

Dari tabel dan gambar di atas menunjukkan kontribusi Pasar Panakkukang terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Makassar pada tahun 2010 sebesar 6,85 persen, sedangkan pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 8,38 persen. Pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 9,15 persen, sedangkan pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 8,09 persen, dan pada tahun 2014 kembali menurun sebesar 7,93 persen.

m. Kontribusi Pasar Niaga Daya terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Makassar pada tahun 2010-2014.

Kontribusi Pasar Niaga Daya terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Makassar dapat di hitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

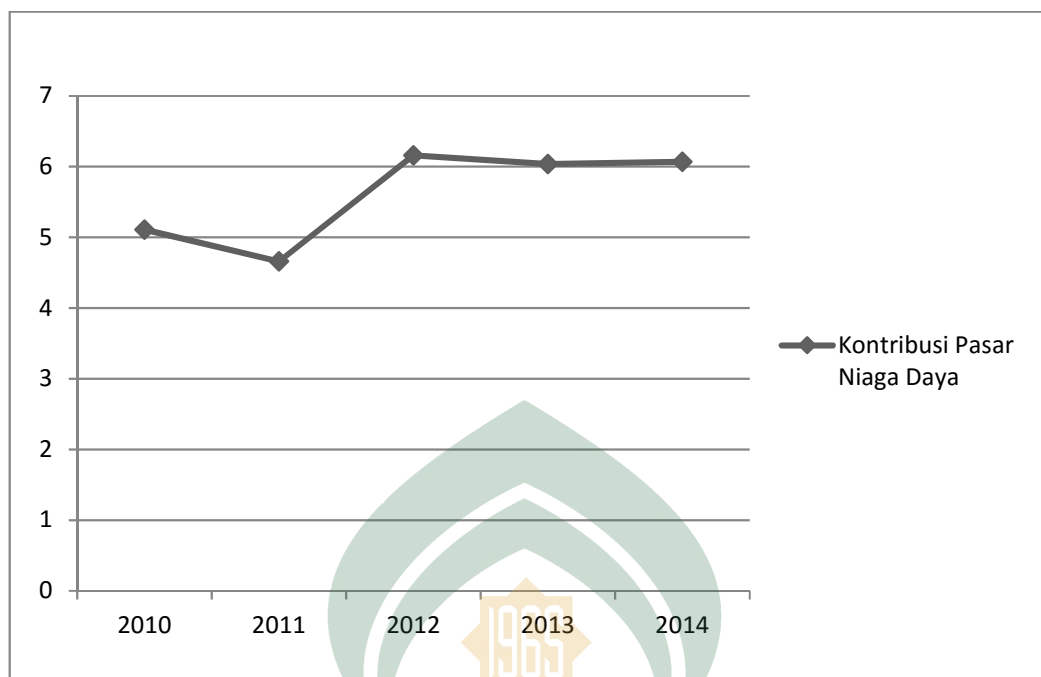
$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pasar Niaga Daya}}{\text{Retribusi Pasar}} \times 100\%$$

Tabel 20 Kontribusi Pasar Niaga Daya terhadap Penerimaan retribusi pasar di Kota Makassar pada tahun 2010-2014.

Tahun	Pasar Niaga Daya (Rupiah)	Retribusi Pasar (Rupiah)	Hasil (%)
2010	270.257,500	529.402,5400	5,11
2011	218.110,500	469.042,9675	4,66
2012	342.996,500	556.998,7300	6,16
2013	448.418,000	743.611,0500	6,04
2014	490.772,500	809.103,2500	6,07

Sumber: PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar (diolah), 2009.

Gambar 15 Kontribusi Pasar Niaga Daya di Kota Makassar.



Sumber: PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar (diolah), 2009.

Dari tabel dan gambar di atas menunjukkan kontribusi Pasar Niaga Daya terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Makassar pada tahun 2010 sebesar 5,11 persen, sedangkan pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 4,66 persen. Pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 6,04 persen, sedangkan pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 6,04 persen, dan pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 6,07 persen.

n. Kontribusi Pasar Mandai terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Makassar pada tahun 2010-2014.

Kontribusi Pasar Mandai terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Makassar dapat di hitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

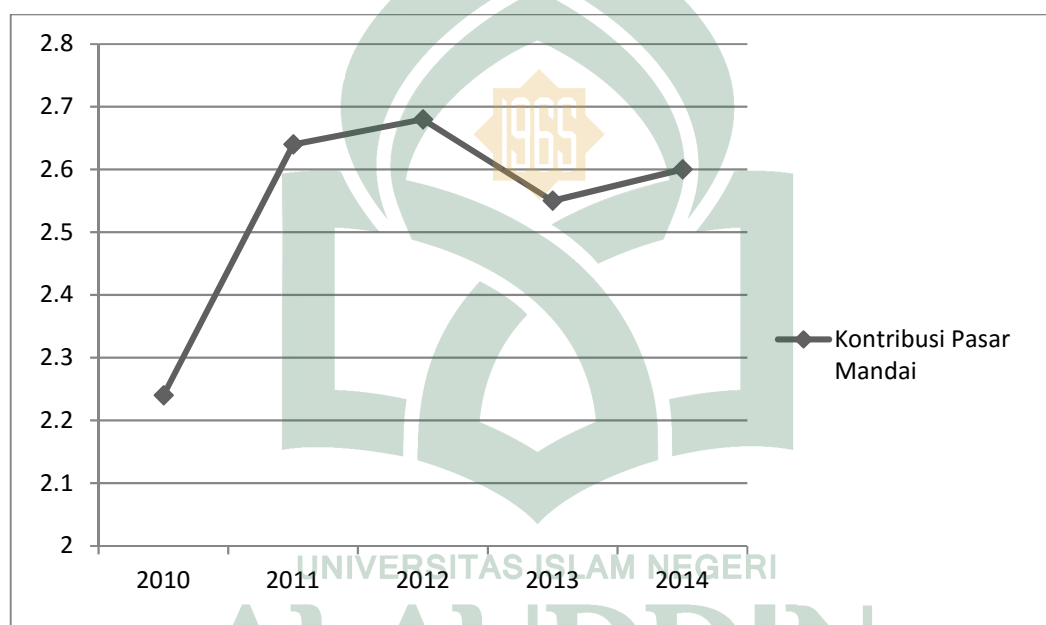
$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pasar Mandai}}{\text{Retribusi Pasar}} \times 100\%$$

Tabel 21 Kontribusi Pasar Mandai terhadap Penerimaan retribusi pasar di Kota Makassar pada tahun 2010-2014.

Tahun	Pasar Mandai (Rupiah)	Retribusi Pasar (Rupiah)	Hasil (%)
2010	118.157,600	529.402,5400	2,24
2011	123.587,600	469.042,9675	2,64
2012	149.131,000	556.998,7300	2,68
2013	189.094,100	743.611,0500	2,55
2014	210.102,500	809.103,2500	2,60

Sumber: PD. Pasar Raya Makassar Kota Makassar (diolah), 2009.

Gambar 16 Kontribusi Pasar Mandai di Kota Makassar



Sumber: PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar (diolah), 2009.

Dari tabel dan gambar di atas menunjukkan kontribusi Pasar Mandai terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Makassar pada tahun 2010 sebesar 2,24 persen, sedangkan pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 2,64 persen. Pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 2,68 persen, sedangkan pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 2,55 persen, dan pada tahun 2014 kembali meningkat menjadi 2,60 persen.

- o. Kontribusi Pasar Darurat Utara terhadap Penerimaan Rtribusi Pasar di Kota Makassar pada tahun 2010-2014.

Kontribusi Pasar Darurat Utara terhadap Penermaan Retribusi pasar di Kota Makassar dapat di hitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

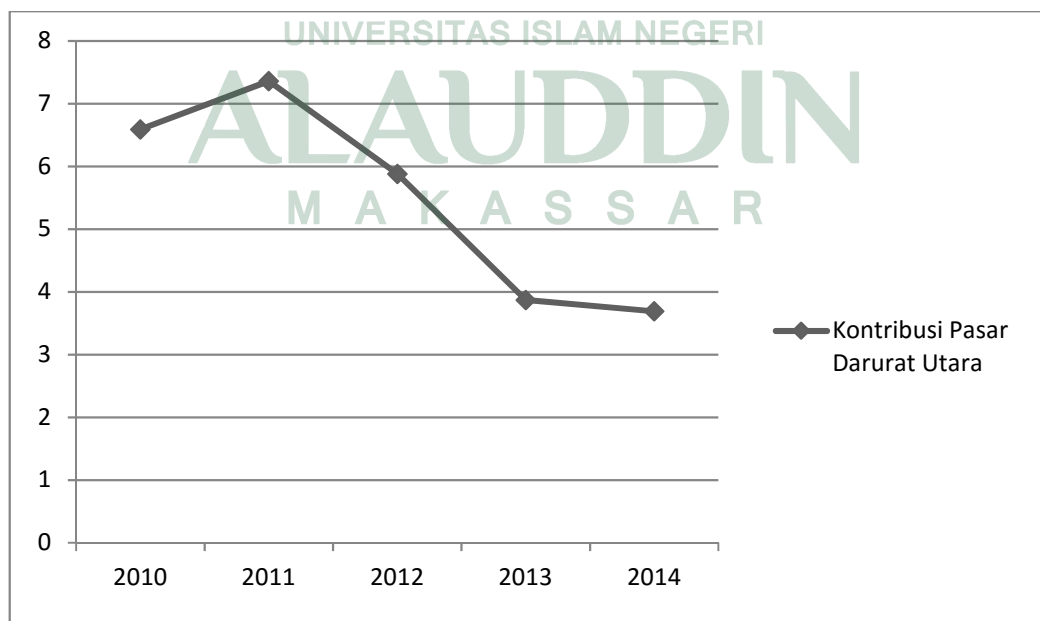
$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pasar Darurat Utara}}{\text{Retribusi Pasar}} \times 100\%$$

Tabel 22 Kontribusi Pasar Darurat Utara terhadap Penerimaan retribusi pasar di Kota Makassar pada tahun 2010-2014.

Tahun	Pasar Darurat Utara (Rupiah)	Retribusi Pasar (Rupiah)	Hasil (%)
2010	348.580,000	529.402,5400	6,59
2011	344.9190,00	469.042,9675	7,36
2012	326.7930,00	556.998,7300	5,88
2013	287.7390,00	743.611,0500	3,87
2014	298.1580,00	809.103,2500	3,69

Sumber: PD. Pasar Makassar Raya di Kota Makassar (diolah), 2009.

Gambar 17 Kontribusi Pasar Darurat Utara di kota Makassar



Sumber: PD. Pasar Makassar di Kota Makassar (diolah), 2009.

Dari tabel dan gambar di atas menunjukkan kontribusi Pasar Darurat Utara terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Makassar pada tahun 2010 sebesar 6,59 persen, sedangkan pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 7,36 persen. Pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 5,88 persen, sedangkan pada tahun 2013 menurun menjadi 3,87 persen, dan pada tahun 2014 terus mengalami penurunan sebesar 3,69 persen.

Dari hasil kontribusi di setiap objek pasar di atas dapat kita simpulkan bahwa yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap penerimaan retribusi pasar di Kota Makassar selama masa pengamatan yaitu lima tahun adalah Pasar Terong dengan kontribusi Rata-rata 14,83 persen, sedangkan yang memberikan kontribusi terendah adalah pasar Mandai dengan kontribusi rata-rata 2,54 persen. Kontribusi pasar di Kota Makassar masih di kategorikan rendah dan belum efektif, hal ini disebabkan karna kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam membayar retribusi pasar dan petugas kurang tegas dalam pemungutan retribusi pasar. Oleh sebab itu pemerintah kota Makassar khususnya PD Pasar Makassar Raya Kota Makassar perlu meningkatkan kinerja dalam pemungutan retribusi pasar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data dapat di simpulkan bahwa kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar selama tahun 2010-2014 relatif kecil. Pada tahun 2010 kontribusi retribusi pasar sebesar 2,52 persen, sedangkan pada tahun 2011 menurun sebesar 1,34 persen, pada tahun 2012 terus mengalami penurunan sebesar 1,15 persen, sedangkan pada tahun 2013 dan 2014 meningkat secara perlahan menjadi 1,19 persen dan 1,34 persen.

Rendahnya kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar, disebabkan karena program intensifikasi pemerintah dalam hal ini penarikan retribusi secara intensif oleh petugas retribusi daerah belum optimal serta kesadaran masyarakat wajib retribusi masih rendah. Selain dua hal tersebut, rendahnya kontribusi retribusi pasar terhadap PAD juga disebabkan karena kontribusi 15 objek pasar yang dikelola PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar (Makassar mall, Terong, Butung, Kampong Baru, Pannampu, Kalimbu, Sambung Jawa, Maricaya, Sawah, Pa'baeng-baeng, Parangtambung, Panakkukang, Niaga Daya, Mandai, Darurat Utara) terhadap retribusi pasar dinilai masih rendah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis kemukakan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah dan semua jajaran yang terkait

Diharapkan kepada pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar agar bisa meningkatkan pengawasan pelaksanaan retribusi pasar, meningkatkan sumber daya manusia pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dengan mengadakan penyuluhan. Dan perlu melakukan perhitungan potensi, target dan penerimaan secara dinamis dari waktu ke waktu, mengingat retribusi pasar bisa dapat berkembang seiring perkembangan perekonomian.

2. Bagi akademisi

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bahwa penelitian ini mampu dijadikan bahan referensi yang bermanfaat selain dapat dikembangkan dengan faktor-faktor lain seperti retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi terminal, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan dan lain sebagainya, sehingga dapat dilakukan perbandingan kontribusi mana yang mendominasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, 2000. Buku Dasar-dasar Perpajakan Jakarta.
- Bagus Santoso, 1995. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Citra Umbara. Bandung.
- Budiguyono, 1995. Pengertian Analisis Kontribusi. K. Jakarta.
- Caroline, 2005. Analisis Kinerja Penerimaan Retribusi Pasar. Tesis Universita Diponegoro. Semarang.
- Haryadi, Dedy, 2003. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan PAD Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah Kota Bengkulu. Skripsi Fisip UMY. Yogyakarta.
- Halim Abdul & Syukriy Abdullah, 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemda: Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali. Jurnal Ekonomi STEI No.2/Tahun XIII/25.
-, 2001. Rumus Kontribusi. Fakultas Ekonomi. Yogyakarta.
-, 2002. Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Insukindro, dkk, 1994. Peranan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Usaha Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. KKD, FE UGM. Yogyakarta
- Kamaroellah, R. Agus, 2007. Analisis Kontribusi Penerimaan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2002-2006. Skripsi Universitas Islam Madura UIM. Pamekasan.
- Mahmudi, 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Erlangga. Yogyakarta.
- Novalistia, R.L, 2016. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi daerah, Lain-Lain Pendapatan yang sah Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah di Provinsi Jawa Tengah, Journal Of Accounting (2)2.
- Putra Windhu, 2008. Ekonomi Industri. Alfabeta. Bandung.
- Rahman, Herlina, 2015. Pengertian PAD. Jakarta.
- Said, Mas'ud, 2008. Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia. UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang. Malang.

- Santoso, Bagus, 1995. Retribusi Pasar Sebagai Pendapatan Asli Daerah, Studi Kasus: Pasar Kabupaten Sleman. Prisma No. 4.
- Suparmoko, 2002. Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pemerintah Daerah. Andi Offset. Yogyakarta.
- Slamet Soelarno, 2003. Administrasi Pendapatan Daerah. STIA LAN Press. Jakarta.
- Siahaan P Marihot , 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rajawali. Jakarta.
- Sugiyono, 2012. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). CV. Alfabeta. Bandung.
-, 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. CV. Alfabeta. Bandung.
- Suharsimi Arikunto, 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. PT. Rineka Cipta. Jakarta.





DAFTAR REKAPITULASI : TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
 TAHUN ANGGARAN 2009 - 2013

NO.	URAIAN PENERIMAAN	TAHUN 2009			TAHUN 2010			TAHUN 2011			TAHUN 2012			TAHUN 2013			TAHUN 2014
		TARGET TAHUN 2009	REALISASI	%	TARGET TAHUN 2010	REALISASI	%	TARGET TAHUN 2011	REALISASI	%	TARGET TAHUN 2012	REALISASI	%	TARGET TAHUN 2013	REALISASI	%	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH																
1	PAJAK DAERAH	115.213.922.000	115.221.318.974	100,01	134.216.181.000	133.551.818.678	99,51	260.486.460.000	270.547.821.116	103,86	337.167.338.150	358.445.926.266	115,21	460.567.099.000	518.703.083.895	112,62	501.718.650.000,00
2	RETRIBUSI DAERAH	44.281.124.000	49.980.819.820	90,29	62.971.506.000	59.729.103.725	94,85	66.349.809.000	62.013.147.363	93,23	84.141.194.500	69.757.410.559	82,31	86.772.319.000	79.650.936.626	91,79	84.844.404.000,00
3	HASIL PERUSAHAAN MILIK DAERAH & HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIMILIKIKAN	5.946.057.000	5.665.752.808	95,29	6.124.201.000	5.817.813.855	95,00	6.391.525.000	6.355.200.148	99,43	6.553.899.000	6.448.544.026	98,39	6.975.538.000	6.355.687.311	91,11	11380027000
4	LAIN - LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	11.187.084.000	9.828.794.212	87,36	13.617.000.000	11.017.594.820	81,06	11.907.520.000	12.746.383.261	107,01	13.372.520.000	20.820.918.657	155,70	15.412.495.000	22.532.217.115	146,49	11.012.495.000,00
	JUMLAH PAD	176.625.387.000	170.698.725.814	96,64	216.928.890.000	210.136.331.088	96,87	345.335.311.000	351.692.552.588	101,84	411.231.952.000	484.972.799.508	109,91	569.727.461.000	627.241.924.947	110,10	608.955.576.006
B	DANA PERIMBANGAN																
1	BAGI HASIL PAJAK	137.300.443.000	142.602.186.490	103,51	176.354.985.000	170.552.155.100	96,71	141.816.546.000	124.804.208.709	88,00	142.585.031.000	100.543.557.310	112,59	76.420.044.000	85.548.572.766	111,95	68.743.722.000
2	BAGI HASIL BUKAN PAJAK	1.843.840.000	721.325.116	39,12	1.805.840.000	208.265.127	39,22	1.805.840.000	1.690.898.816	93,61	1.364.157.000	1.152.927.344	84,52	1.150.985.000	1.260.187.029	109,49	1.150.985.000
	JUMLAH BAGI HASIL	134.544.283.000	143.383.511.606	106,57	178.160.825.000	171.260.420.227	96,13	143.622.386.000	126.494.407.525	88,07	143.949.191.000	161.696.486.654	112,33	77.571.029.000	86.808.764.795	111,91	69.894.707.000
	JUMLAH PAD + BAGI HASIL	311.172.670.000	314.082.237.420	100,94	395.089.715.000	381.396.751.315	96,53	488.957.697.000	478.187.160.113	97,80	585.184.143.000	646.692.286.162	110,31	647.298.491.000	714.050.689.742	110,31	678.850.283.000
3	DANA ALOKASI UMUM	647.299.704.000	647.299.704.000	100,00	644.266.427.000	644.266.427.000	100,00	718.481.333.000	718.481.320.000	100,00	911.122.797.000	911.122.797.000	100,00	1.033.583.901.000	1.033.583.901.000	100,00	1.114.853.212.000
4	DANA ALOKASI KHUSUS	43.151.000.000	43.151.000.000	100,00	45.753.770.000	45.753.700.000	100,00	60.398.100.000	60.398.000.000	100,00	32.644.320.000	32.644.320.000	100,00	40.836.880.000	39.836.880.000	100,00	64.792.920.000
	JUMLAH DANA PERIMBANGAN	824.994.987.000	833.834.215.606	101,07	868.180.952.000	861.280.547.227	99,21	923.001.825.000	905.873.927.525	98,14	1.087.716.308.000	1.105.463.603.654	101,63	1.152.041.812.000	1.161.279.547.795	100,80	1.249.540.839.000
C	LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH																
1	PENDAPATAN HIBAH DARI LUAR NEGERI	651.006.000	1.559.018.800	239,48	-	650.445.600	-	1.630.000.000	970.971.485	58,85	-	-	-	-	-	-	-
2	DANA DARURAT	-	-	-	100.000.000	100.000.000	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROPINSI	121.500.000.000	115.012.318.874	94,66	148.066.788.000	155.704.123.538	105,16	167.388.118.000	166.494.273.844	99,50	186.622.687.440	194.255.865.128	104,09	209.916.715.000	222.860.704.035	106,17	248.374.597.000
4	DANAPENYESUAIAN	49.180.487.000	68.965.037.000	140,23	191.744.564.000	190.426.514.332	99,31	262.311.839.000	262.917.499.880	100,23	211.436.166.000	211.436.166.000	100,00	297.058.872.000	297.058.872.914	100,00	-
5	PENDAPATAN HIBAH DARI PEMERINTAH LAINNYA	24.793.296.800	25.648.404.800	103,45	31.364.687.000	31.364.688.800	100,00	40.471.289.000	40.611.289.800	100,35	49.996.979.560	49.996.979.560	100,00	58.911.771.000	58.911.771.360	100,00	60.058.788.000
	JUMLAH LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH	196.124.789.800	211.184.779.474	107,68	371.276.039.000	378.245.771.270	101,88	471.773.306.000	471.004.035.009	99,84	448.055.833.000	455.689.010.688	101,70	565.887.158.000	578.831.348.309	102,29	308.433.385.000
	JUMLAH PENDAPATAN (A+B+C)	1.197.743.163.800	1.215.017.720.894	101,50	1.456.351.881.000	1.419.662.649.585	97,54	1.920.109.636.000	1.922.696.587.597	99,91	1.977.037.785.000	2.040.125.413.850	103,19	2.243.911.511.000	2.359.973.803.051	105,18	2.166.929.800.000

www.djpk.deptkeu.go.id

Lp data → keuangan daerah

1998
1
2001

LAPORAN PENDAPATAN DAN REALISASI UNIT FASAL
TAHUN 2008 s/d 2014

No	Uraian	Target T. A 2008	Realisasi T.A 2008	%	TARGET T. A 2009	Realisasi T.A 2009	%	TARGET T. A 2010	Realisasi T.A 2010	%	TARGET T. A 2011	Realisasi T.A 2011	%	TARGET T.A 2012	Realisasi T.A 2012	%	TARGET T.A 2013	Realisasi T.A 2013	%	TARGET T.A 2014	Realisasi T.A 2014	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Meisassar Mail	807.185.000	709.004.500	87,86%	833.382.900	750.882.500	89,99%	807.525.400	736.836.900	91,26%	956.298.000	815.467.975	84,94%	528.300.000	365.502.000	118,17%	938.790.000	849.602.500	153,88%	836.860.000	905.212.000	108,17%	
2	Tereng	780.605.000	659.919.000	83,58%	860.348.000	590.002.000	68,58%	828.502.500	823.942.000	75,30%	807.645.400	715.738.000	80,81%	598.227.000	462.208.000	89,37%	1.251.520.000	1.158.601.000	94,08%	1.403.885.740	1.255.406.000	89,42%	
3	Bulang	224.380.000	210.029.000	93,60%	260.182.700	224.180.000	86,17%	273.270.000	219.415.000	80,29%	120.207.200	112.342.500	86,28%	324.890.000	290.550.000	120,21%	550.900.000	448.375.000	102,77%	740.520.000	734.868.000	99,24%	
4	Kampung Baru	120.330.000	104.043.000	86,46%	137.831.750	111.498.000	81,01%	130.718.500	123.579.000	88,45%	405.768.000	332.374.500	81,93%	408.958.000	418.434.500	102,85%	587.368.600	611.818.900	104,18%	702.257.500	666.934.600	94,97%	
5	Pannampu	338.255.000	329.010.500	97,28%	373.727.000	318.574.000	84,71%	361.305.500	338.354.500	89,87%	405.767.800	332.374.500	81,93%	408.958.000	418.434.500	102,85%	587.368.600	611.818.900	104,18%	702.257.500	666.934.600	94,97%	
6	Kalimbu	193.475.000	191.638.500	99,05%	241.111.250	192.972.500	80,03%	241.962.250	185.638.000	81,18%	287.351.000	242.851.000	92,31%	254.887.000	211.563.500	106,97%	322.965.000	361.301.500	111,86%	383.392.500	382.130.500	99,67%	
7	Kerang-Kerang													25.807.000	10.957.000	42,47%	24.115.000	41.222.000	48,37%	63.310.000	47.485.500	75,00%	
8	Sambung Jawa	188.806.700	230.356.500	113,89%	280.080.000	282.478.000	93,71%	266.410.900	273.535.000	94,45%	380.875.000	410.671.000	107,82%	400.085.000	404.538.000	101,12%	481.282.000	513.515.500	106,70%	534.240.000	572.663.500	107,19%	
9	Cenderawasih													48.730.000	48.730.000	95,70%	113.500.000	90.410.000	82,63%	154.501.000	135.431.000	87,66%	
10	Manisaya	180.085.000	142.242.000	78,23%	231.323.500	123.144.500	53,23%	258.802.000	106.213.000	41,05%	245.880.000	72.514.000	29,58%	315.190.000	218.268.000	76,01%	563.823.150	359.122.500	98,71%	374.968.400	368.250.400	98,21%	
11	Sawah	187.804.000	139.284.000	76,42%	211.854.000	150.797.500	71,19%	188.305.000	146.721.500	77,70%	207.178.800	181.864.500	76,03%	195.104.000	203.486.000	109,92%	254.221.250	204.349.500	80,55%	268.812.650	240.547.500	89,49%	
12	Mamading													40.450.000	17.661.000	43,74%	53.231.000	64.047.000	120,32%	89.710.000	82.078.000	90,05%	
13	Pabaeng-caeng	442.818.000	435.520.000	98,35%	510.102.950	458.620.400	92,07%	508.972.000	1.217.359.000	238,32%	777.463.000	836.931.000	82,10%	623.436.000	630.425.000	111,23%	748.468.000	739.715.500	96,84%	785.113.000	801.081.500	102,42%	
14	Pabaeng-caeng Timur													204.384.000	86.273.500	42,22%	257.902.000	262.254.500	97,81%	370.542.000	283.537.500	104,80%	
15	Perang Tambung	128.484.000	136.278.500	105,61%	180.338.200	154.433.500	85,64%	183.850.450	143.380.500	87,98%	180.737.400	122.714.500	68,00%	188.430.000	188.578.000	100,05%	248.208.000	246.793.000	100,24%	288.174.400	324.254.000	112,52%	
16	Panukukong	284.856.000	296.193.500	103,81%	342.820.000	316.302.000	92,25%	340.583.250	362.144.500	106,33%	435.751.800	362.696.500	84,18%	472.150.000	509.231.500	107,85%	558.058.000	601.283.000	107,75%	626.306.000	641.393.500	102,41%	
17	Niaga Daya	403.260.000	248.188.000	61,54%	327.178.500	264.907.500	80,98%	338.762.500	270.287.000	80,10%	308.642.200	218.110.500	59,03%	459.990.000	342.968.500	83,66%	625.880.000	448.418.000	71,63%	567.750.000	490.772.500	86,44%	
18	Manda	70.710.000	86.665.500	122,57%	111.207.500	94.537.800	85,01%	120.530.500	118.157.000	90,57%	134.436.000	123.587.800	91,93%	135.898.000	149.131.000	109,74%	211.148.100	188.034.100	89,05%	204.496.000	210.102.500	102,74%	
19	Carurat Utara	344.050.000	310.434.500	90,23%	390.880.000	321.814.500	82,33%	352.480.000	348.580.000	98,89%	368.430.000	344.919.000	93,62%	236.449.000	226.743.000	136,80%	265.500.000	287.628.000	108,42%	308.040.000	298.158.000	96,79%	
20	Carurat Selatan													206.760.000	96.348.000	42,73%	272.400.000	283.759.000	104,16%	322.680.000	294.714.000	91,33%	
21	PKL																		512.520.000	539.712.000	105,31%		
22	Hill	241.500.000	137.123.000	56,78%	128.000.000	115.500.000	91,67%	128.000.000		0,00%			0,00%			0%							
23	Modul box	15.850.000	103.532.500	742,17%	5.860.000	5.862.500	102,03%	3.750.000	4.287.500	114,33%	7.950.000	5.850.000	86,16%	28.950.000	13.713.705	87,99%	20.050.000	28.800.000,00	96,16%	33.544.000	25.089.500	74,22%	
24	Reklame	-	-	-	8.400.000	15.612.000	233,48%	11.400.000	0.000.000	0,00%	10.200.000	10.200.000	100,00%										
25	Tunggakan 2001 s/d 06	-	8.305.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
26	Jasa Giro Bank	-	1.832.505	-	-	2.115.250	-	-	8.043.750	-	-	8.881.350	-		13.337.000	0%	-	15.867.873,50	0%	-	-	-	
27	Penerimaan Lain-lain	-	13.180.200	-	-	4.812.100	-	-	17.415.340	-	-	13.538.878	-		-	0%	-	31.003.000	0%	-	392.000.000	0%	
Jumlah		5.098.324.000	4.564.670.855	90,12%	5.481.130.150	4.527.612.250	82,61%	5.477.348.850	5.334.671.880	97,40%	5.940.038.700	4.727.817.801	79,58%	5.908.750.000	5.826.027.200	97,30%	8.070.885.100	8.246.572.673,50	102,18%	8.684.204.440,00	8.891.082.100,00	102,14%	
		43.139.452.969,50																					

Makassar, Desember 2013

Kepala Bagian Keuangan

MUHAMMAD SAHID, SP

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama ROHANDIL.S lahir pada tanggal 22 Januari tahun 1993 di Uloe, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone. Penulis merupakan anak pertama dari lima bersaudara, dari pasangan Suardi dan Sitti Rohani. Penulis mulai menjalani pendidikan di SDN 91 Uloe pada tahun 2005. Penulis melanjutkan sekolahnya di SMPN 1 Dua Boccoe dan lulus pada tahun 2008. Pada tahun yang sama penulis diterima di SMAN 1 Ajangale dan lulus pada tahun 2011. Pada tahun 2011 penulis meninggalkan desa tercinta untuk melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi di Kota Makassar, menjadi pilihan penulis dengan harapan besar agar dapat memperoleh ilmu dan mengembangkan pola pikir. Penulis masuk di Universitas Islam Negeri Makassar dan diterima sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R